

BAB III

PELANGGARAN HAM ATAS PERUSAKAN MASJID AL-KAUTSAR MILIK JEMAAT AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO TAHUN 2016

3.1. Asal Mula Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

Sejarah lahirnya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, pertama kali diprakarsai oleh Ta'ziz yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh. Awal mula masuknya ajaran Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah sesudah Ta'ziz membaca 5 buku yang diberikan dari seorang muridnya sebagai tanda terimakasih karena telah bersedia meminjamkan mimbar khutbah kepada muridnya untuk acara hajatan putri dari muridnya tersebut. Ta'ziz kemudian menekuni 5 buku yang didapatnya tersebut dan mencari refrensi yang didaftar pustaka dari masing-masing buku yang dibacanya.

“Setelah itu ada dari santri saya yang merupakan anggota dari Ahmadiyah, sebelumnya saya juga ga tau itu kalau ternyata dia anggota dari Jemaat Ahmadiyah.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta'ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Darmoko merupakan sosok pelopor yang memperkenalkan Ahmadiyah kepada Ta'ziz dengan memberikan Ta'ziz lima macam buku bacaan tentang Ahmadiyah. Adapun beberapa judul buku tersebut antara lain Filsafat Ajaran Islam, Khilafah Telah Berdiri, Islam in Qadian, Masalah Kenabian dan Bai'at. Kelima buku tersebut merupakan tulisan dari Mirza Ghulam Ahmad yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

“Kemudian saya diberi 5 buah buku setelah mengembalikan mimbar yang dipinjam, buku-buku tersebut antara lain Filsafat Ajaran Islam, Khilafah Telah Berdiri, Islam in Qadian, Masalah Kenabian, kemudian Baiat kalo ga salah. Ada lima buku kemudian saya pelajari”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Lima buku tersebut mengandung isi mengenai Ahmadiyah yang didapat dari muridnya yang tinggal di Desa sebelah ketika mengembalikan mimbar miliknya yang pernah dipinjamkan untuk khotbah Mubaligh Ahmadiyah pada acara hajatan putri dari muridnya. Ta’ziz penasaran dengan isi dari kelima buku tersebut kemudian buku tersebut dibaca satu persatu yang menghabiskan waktu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan membaca buku tersebut, Ta’ziz tidak langsung masuk dan bergabung menjadi Jemaat Ahmadiyah tetapi menelusuri terlebih dahulu refrensi dari buku-buku yang telah dibacanya yang berkaitan dengan Ahmadiyah.

“Saya tanyakan dulu ke guru-guru saya seperti ke Pak Mahfud. Saya tanyakan itu “bagaimana ini pak ?” saya tanyakan itu, ini kok seperti ini. Saya masih belum Bai’at waktu itu, beliau bilang “ini sih dasarnya hadist”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Saat berkunjung ke guru atau kyainya yang ada di Cepiring, tanpa sengaja Ta’ziz menemukan buku yang sinkron dengan yang dicarinya dari refrensi-refrensi kelima buku tentang Ahmadiyah tersebut. Ta’ziz merasa bahwa ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan untuk meyakinkan hatinya dan bergabung menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1999. Adapun pernyataan yang disampaikan Ta’ziz antara lain sebagai berikut.

“Saya justru mantapnya itu setelah ketemu tafsir Surat Jum’ah dari tafsir Ibnu Kasir keluaran Singapur dirumah Bapak Mahfud. Saya kira cuma catatan biasa aja itu refrensi tapi kok ternyata beneran ada”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Setelah dipelajari dan ditelusuri, Takziz masih belum melirik untuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah ini. Kemudian rasa penasarannya membawa Takziz untuk berkonsultasi dan menanyakan dengan para guru atau Kyai-nya dengan maksud untuk lebih memahami buku-buku yang telah dibacanya tersebut. Saat melihat refrensi dari buku-buku yang telah dibaca, ternyata Takziz melihat ada kecocokan buku lain yang membuatnya yakin terhadap buku yang ditulis dan memantapkan diri untuk masuk kedalam Jemaat Ahmadiyah.

Pada tahun 1999, Takziz bersama istri dan anaknya memantapkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan untuk dapat bergabung ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Takziz dan keluarga mengikuti Bai’at sebagai tanda telah masuknya anggota baru bagi Jemaat Ahmadiyah tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, adik-adik kandung dari Takziz memilih untuk mengikuti Bai’at dan masuk menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

“Kemudian saya Baiat mulai tahun 1999 oleh khalifah Ahmadiyah yang keempat yang merupakan cucu dari Mirza Ghulam Ahmad di UGM tahun 2000 berbarengan dengan acara Revitalisasi Umat Islam dari UGM”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Ajaran Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh setelah menggelar musyawarah yang memenuhi bersama para orang-orang yang memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Awal mula

masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah salah satu murid Ta'ziz dari Majelis Ta'lim milik Ta'ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah mubaligh Ahmadiyah di pernikahan putri dari muridnya. Ketika mengembalikan mimbar, Ta'ziz diberi lima buah buku bacaan tentang Ahmadiyah dari muridnya tersebut kemudian dibaca dan dipelajari dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah.

“Sejak tahun 1999, tapi kalau sejak cabangnya berdiri dari tahun 2000. Didirikan atas musyawarah yang memenuhi.” (Wawancara dengan Hajar Umi F, di Desa Purworejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Sebelum bergabung dan masuk dengan Jemaat Ahmadiyah, Ta'ziz merupakan bagian dari muslim Muhammadiyah di desanya. Bersama dengan teman-temannya yang merupakan sesama lulusan dari Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin, Ngruki, Grogol, Sukoharjo Solo Raya yang terkenal menganut ajaran islam garis keras. Ta'ziz memiliki Majelis Taklim sendiri yang ia kembangkan di kediamannya. Santri yang terdapat dalam majelisnya yang mencapai hingga 150 santri dari Desa Purworejo sendiri maupun dari luar desa.

“Sebelum saya masuk Jemaat Ahmadiyah, dulu saya pernah memiliki dan mengajar di Majelis Taklim, murid saya mencapai 150-an orang dari warga sini. Dari luar juga banyak yang ngaji disini”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta'ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Pelajaran yang diajarkan kepada santrinya didapat dari ilmu yang diterimanya saat masih di Pesantren. Namun, semenjak Ta'ziz memutuskan untuk bergabung dan masuk menjadi golongan dari Jemaat Ahmadiyah, perlahan santri dari Majelis Taklimnya mulai meninggalkannya. Sampai saat ini, Majelis Taklim yang

didirikan Ta'ziz sudah tidak ada lagi dan hanya menyisakan beberapa murid yang masih bertahan di Jemaat Ahmadiyah.

Setelah masuk dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 berdirilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh yang dipelopori oleh Ta'ziz setelah mendapatkan pengesahan dari Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang terletak di Bogor.

“Kemudian pada tahun 2000 Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh mulai berdiri setelah mendapat pengesahan dari PB (Pengurus Besar) Jemaat Ahmadiyah Indonesia.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta'ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Di Desa Purworejo sendiri saat ini ada 4 Kartu Keluarga (KK) yang tergabung kedalam Jemaat Ahmadiyah. Adapun nama kepala keluarga yang tergabung dalam anggota Jemaat Ahmadiyah adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Nama Anggota Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1.	Ta'ziz	Laki-Laki	Ketua JAI Cabang Gemuh	Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
2.	Sholehah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
3.	Hajar Ummu Fatikh	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
4.	Nafilatun Nafi'ah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
5.	Muhammad Ghulam M	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	
6.	Abdul Aziz	Laki-Laki	Sekrtaris Tabligh & Sek. Al Wasiyat & Amin	
7.	Nurul Hidayah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
8.	Aufa Ahida	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
9.	Afshokh Ahada	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
10	Ahmad Irsyad Syahid	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	
11	Kamzah	Laki-Laki	Sekretaris Umum, Sekr. Maal & Sekr. Ta'limul Qur'an & W Ardli & Sekr. Ziro'at & Muhasim	
12	Punyah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	

13	Afif Amatus Salamah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
14	Irfan	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	
15	Nizam	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	
16	Slamet Yatin	Laki-Laki	Sekretaris Umur Ammah	
17	Nurul Halimah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	
18	Radif	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	
19	Muslikhah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris Umum JAI Cabang Gemuh 2016-2019

Adapun beberapa nama anggota yang tergabung ke dalam Jemaat Ahmadiyah se-Cabang Gemuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nama Anggota Jemaat Ahmadiyah Se-Cabang Gemuh

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1.	Ta'ziz	Laki-Laki	Ketua JAI Cabang Gemuh	Purworejo
2.	Kamzah	Laki-Laki	Sekretaris Umum, Sekr. Maal & Sekr. Ta'limul Qur'an & W Ardli & Sekr. Ziro'at & Muhasim	Purworejo
3.	Abdul Aziz	Laki-Laki	Sekrtaris Tabligh & Sek. Al Wasiyat & Amin	Purworejo
4.	Sujono	Laki-Laki	Sekretaris Ta'lim & Sekretraris Tahrik Jadid, Sekr. Waqfi Jadid	Pegandon
5.	Slamet Yatin	Laki-Laki	Sekretaris Umur Ammah	Purworejo
6.	Darmoko	Laki-Laki	Sekretaris Khas & Sekretaris Isya'ad & Sekretaris Ummur Ammah & Sekretaris Dhiafat & Sekretaris Sanat o Tijarat	Rowobanten
7.	Sutisna	Laki-Laki	Muballigh	Pegandon
8.	Sholehah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
9.	Hajar Ummu Fatikh	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
10	Nafilatun Nafi'ah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
11	Muhammad Ghulam Muqada'i	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
12	Nurul Hidayah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
13	Aufa Ahida	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
14	Afsokh Ahada	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
15	Ahmad Irsyad Syahid	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
16	Puniyah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
17	Afif Amatus Salamah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
18	Irfan	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo

19	Nizam	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
20	Nurul Halimah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
21	Radif	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
22	Muslikhah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Purworejo
23	Nurwati	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
24	Mahda Cindy Fatikha	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
25	Najma Ahmadina P	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
26	Safawi	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
27	Munawaroh	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
28	Lia Armaya	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
29	Ahan	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
30	Tio	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
31	Nukha	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
32	Atikatul Sidikah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
33	Lius	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Rowobranten
34	Siti Hindun	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
35	Ahmad Kamaluddin	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
36	Zahir Maulana	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
37	Ulfa Mukoagow	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
38	Rodhiyah	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
39	Naima Musrat	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
40	Naim Ahmad	Laki-Laki	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon
41	Nala	Perempuan	Anggota JAI Cabang Gemuh	Pegandon

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris Umum JAI Cabang Gemuh 2016-2019

Seiring berkembangnya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, awalnya tidak mendapatkan tentangan dari pihak manapun. Hubungan antara warga masyarakat dengan Jemaat juga baik-baik saja. Namun memang tidak dipungkiri dari barisan Islam garis keras ada yang tidak setuju jika Jemaat Ahmadiyah ada di Desa Purworejo. Barisan islam garis keras yang ada di Desa Purworejo dikenal dengan sebutan organisasi Majelis Mujahidin Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Majelis Mujahidin Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir dan memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah islamiah sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku.

Gambar 3.1
Gambar Masjid Al-Kautsar setelah dirusak oleh warga



Sumber : *Gusduriansemarang.com*, 23 Mei 2016

Hubungan yang terjalin antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat desa Purworejo terlihat baik-baik saja dan tidak ada konflik diantara kedua belah pihak. Keakraban antar masyarakat di desa Purworejo juga dibuktikan bahwa adanya arisan ibu-ibu yang ada didesanya yang diadakan setiap bulan sekali di desanya. Hal ini tentu saja membuat Jemaat Ahmadiyah tidak pernah menyangka jika masjid yang mereka bangun dengan susah payah harus mereka kerjakan ulang pembangunannya dari awal karena kerusakan yang disebabkan oleh warga yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah.

“Nanti kalau mau dilihat hubungan antara Jemaat dengan warga ada arisan ibu-ibu di adik saya nanti jam 5 sore. Adik saya juga masuk Jemaat Ahmadiyah dan hubungan dengan warga yang baik-baik saja tidak ada konflik apapun”.(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Keterangan yang sama juga disampaikan dari Kyai Mas'ud mengenai hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Desa Purworejo. Dari luar memang tidak terlihat bahwa ada pihak yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah. Aktivitas antar warga masyarakat juga baik-baik saja dan berjalan seperti biasa. Saling bertegur sapa dengan warga masyarakat selalu dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dengan warga sekitar.

“Sama sekali tidak ada apa-apa mbak, dari masyarakat Muhammadiyah juga tidak ada bisik-bisik apapun. Dari NU juga tidak ada omongan apapun. Setahu saya malah tenang-tenang saja masyarakat sini.”(Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas'ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh di Desa Purworejo sudah 19 tahun berdiri dan bertahan menjadi masyarakat minoritas yang hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas yang ada di Desa Purworejo. Meskipun kehadiran Jemaat Ahmadiyah ditentang oleh banyak pihak, anggota Jemaat Ahmadiyah tetap bertahan dengan segala sikap penolakan yang diberikan dari masyarakat. Jemaat Ahmadiyah sudah memahami bahwa hal tersebut sudah menjadi risiko besar untuk masyarakat minoritas yang hidup di tengah masyarakat mayoritas. Jemaat Ahmadiyah hanya bisa berharap adanya sikap toleransi dan penerimaan dari masyarakat untuk dapat menerima Jemaat Ahmadiyah dan dapat hidup berdampingan dengan rukun tanpa adanya kebencian dari masyarakat mayoritas.

Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo tidak mengalami peningkatan jumlah anggota secara signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri yang membatasi Jemaat Ahmadiyah dalam

melakukan aktivitas keagamaannya. Selain dari internal, faktor eksternal seperti dari sikap masyarakat yang memandang Ahmadiyah sesat juga menjadi faktor penekan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo maupun Jemaat Ahmadiyah secabang Gemuh di Kabupaten Kendal. Penambahan jumlah anggota hanya dari pernikahan maupun keturunan dari anggota Jemaat Ahmadiyah sendiri.

3.2. Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

Latar belakang terjadinya peristiwa perusakan Masjid Al-Kautsar adalah adanya beberapa kelompok masyarakat khususnya dari organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ada di desa Purworejo. Organisasi yang dibawa oleh segelintir orang yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo ini dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir bersama dengan yang bertujuan untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin untuk berjuang bersama dalam penegakan Syariat Islam dalam aspek kehidupan, sehingga Syariat Islam menjadi rujukan tunggal dalam sistem pemerintahan dan kebijakan negara secara nasional maupun internasional.

Aliansi ini dikembangkan dalam tiga aliansi, yaitu (1) Kebersamaan dalam misi menegakkan Syariat Islam (*tansiqul fardi*); (2) Kebersamaan dalam program menegakkan Syariat Islam (*tansiqul 'amali*) dan; (3) Kebersamaan dalam satu institusi penegakan Syariat Islam (*tansiqun nidhami*). Lembaga ini dilahirkan melalui kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Agustus 2000. Kongres tersebut bertemakan Syariat Islam dihadiri lebih dari 1800 peserta dari 24 Provinsi Indonesia dan beberapa utusan luar negeri. Dari kongres inilah yang akhirnya mengamanatkan kepada 32 tokoh islam Indonesia

yang tercatat sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk meneruskan misi Syariat Islam dalam wadah Majelis Mujahidin Indonesia. Saat ini, MMI berpusat di Yogyakarta dan telah tersebar diseluruh Indonesia⁴⁰.

Majelis Mujahidin Indonesia dikenal sebagai organisasi berbasis keagamaan yang sangat keras menentang gagasan-gagasan demokrasi, negara-bangsa, serta bermaksud untuk mendirikan khilafah Islam di Indonesia⁴¹. Munculnya organisasi Majelis Mujahidin Indonesian yang tidak mengharamkan penggunaan kekuatan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beberapa organisasi yang menuntut pembubaran Ahmadiyah antara lain meliputi HTI, Front Pembela Islam (FPI), dan Forum Majelis Taklim Jakarta. Penutupan paksa tempat ibadah dan bentuk-bentuk pelanggaran lain terhadap kebebasan beragama Ahmadiyah tergolong persekusi karena terjadi di banyak tempat dan berulang-ulang⁴².

Gambar 3.2 **Demonstrasi Penolakan Ahmadiyah oleh FPI di Jakarta**



(Foto : *Bbc.dom*, 5 Januari 2019. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46767823>)

⁴⁰ Mejlismujahidin.com.2008. *Profil Majelis Mujahidin Indonesia*. diakses melalui <https://www.majelismujahidin.com/about/profil-mm/> pada 8 Maret 2019 pukul 18.00 WIB.

⁴¹ Husein Abdulsalam. 2018. *Politik Identitas Islam Menguat, tapi Suara Partai Islam Stagnan*. Tirta.id diakses melalui <https://tirto.id/politik-identitas-islam-menguat-tapi-suara-partai-islam-stagnan-cFj6>. pada 11 Maret 2019 pukul 06.46 WIB.

⁴² Bbcnews.com. 2019. *Puluhan Orang Bubarkan Acara Ahmadiyah di Bandung, Panitia Pasrah, Polisi Bantah Mendampingi Massa*. 5 Januari diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46767823> pada 11 Maret 2019 pukul 07.00 WIB.

Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia yang ada di Desa Purworejo, tidak suka dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah yang dapat membangun masjid Ahmadiyah sendiri. Beberapa umpatan, larangan dan teguran kerap kali diterima Jemaat Ahmadiyah ketika mereka mencoba untuk membangun Masjid Al-Kautsar sebelum perusakan terjadi. Teriakan-teriakan yang keras dari Pemerintah Desa dan warga yang menolak seringkali menegur Jemaat Ahmadiyah saat membangun masjid dan disaksikan oleh beberapa masyarakat yang berada di sekitar masjid.

“Adanya kelompok yang tidak suka dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, kemudian menyebarkan rumor yang mengatakan bahwa Ahmadiyah ini dianggap sesat dan keluar dari agama Islam. Sehingga mereka membuat kesepakatan didalam Grup Facebook untuk menghancurkan Masjid Al-kautsar.”(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Dengan menjadikan UU No 1/PNPS/965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai landasan diterbitkannya SKB, maka Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung telah menganggap Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi yang telah menodai agama. Fatwa MUI 198, Rekomendasi MUI 1984, Fatwa MUI tahun 2005, SKB Tiga Menteri 2008 dijadikan dasar bagi kelompok anti Ahmadiyah untuk dijadikan sebagai legitimasi untuk terus melakukan demo anti Ahmadiyah dan menuntuk Pemerintah agar segera membubarkan Jemaat Ahmadiyah.

Berdasarkan penelitian Setara Institute, pada tahun-tahun setelah dikeluarkan fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri, Ahmadiyah kerap menjadi sasaran serangan yang mencapai 546. Jumlah itu termasuk kekerasan yang mengakibatkan

hilangnya tiga nyawa di Cikeusik, Jawa Barat tahun 2011⁴³. Tindak kekerasan yang bersifat pada pandangan diskriminasi terhadap minoritas muncul karena dipicu oleh kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah dinilai tidak mampu melindungi minoritas dan malah menjadi pemicu terjadinya tindak diskriminasi yang dilakukan masyarakat. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah⁴⁴

Gambar 3.3 **Penyegelan Masjid di Depok dan Pengungsi di Lombok**



(Foto : Kompas.com, 5 Juni 2017 diakses melalui
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/05/18455771/pasca-penyegelan.jemaah.ahmadiyah.depok.tarawih.di.halaman.masjid>

Dalam banyak kasus, pemerintah di tingkat lokal malah terlibat persekusi karena tekanan kelompok-kelompok intoleran. Aksi kekerasan dan kebrutalan kelompok intoleran seperti Majelis Mujahidin Indonesia, rupanya mengantarkan mereka terhadap sikap radikalisme. Seperti Abu Bakar Ba'syir yang saat ini

⁴³ Eko Siswono Toyudho. 2011. Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Tempo.co diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-cikeusik> pada 12 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

⁴⁴ Kristian Erdianto. 2016. *Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal di Kecam*. diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/16054031/perusakan.masjid.ahmadiyah.di.kendal.di.kecam?page=all> pada 13 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.

mendekam di penjara karena terlibat mengikuti rangkaian pelatihan gerakan terorisme di Aceh⁴⁵. Bahkan organisasi yang dulu pernah dibawah kepemimpinannya, sekarang telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam daftar hitam teroris⁴⁶. Sementara MMI adalah kelompok teroris yang di bentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2000 silam, Pemimpin Organisasi Teroris Asing (FTO), dan Jemaah Islamiyah (JI). MMI mengklaim bertanggung jawab atas serangan teror yang terjadi di acara peluncuran buku Penulis asal Kanada, Irshad Manji, pada Mei 2012 lalu di Jakarta.

Adanya kelompok Majelis Mujahidin Indonesia di Desa Purworejo, membawa pengaruh untuk menggiring masyarakat desa untuk tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah, mereka tidak mengizinkan pembangunan masjid terus dilanjutkan, mereka mempengaruhi masyarakat untuk ikut menolak pembangunan Masjid Al-Kautsar termasuk Kepala Desa dan beberapa Pemerintah Desa yang tidak suka dengan ajaran agama baru yang dianggap sesat dan keluar dari Agama Islam. Beberapa rumor miring yang beredar di masyarakat mengenai kepercayaan Jemaat Ahmadiyah membuat masyarakat yang memiliki tingkat toleransi rendah akan mudah terpicu dan menjadi terpengaruh untuk tidak menyukai Jemaat Ahmadiyah.

⁴⁵ Bbcnews.com.2019. *Abu Bakar Ba'asyir akan Pilih Bertahan di Penjara dan Tolak Bebas Bersyarat*. diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46942952> pada 2 mei 2019 pukul 19.00 WIB.

⁴⁶ Riva Desstanhia Suastha. 2017. *AS Masukkan Majelis Mujahidin Indonesia dalam Daftar Teroris*. Diakses pada Cnnindonesia.com melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170613164714-134-221484/as-masukan-majelis-mujahidin-indonesia-dalam-daftar-teroris> pada 3 Mei pukul 16.43 WIB.

“Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan. Bisa saja dia tidak paham, bisa saja dia paham tetapi tidak merealisasikan. Sebenarnya ada apa dari pemerintah kita juga tidak tahu, kita mau minta dialog untuk berbicara di depan forum juga kita tidak pernah dikasih kesempatan dari pemerintah sendiri.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Banyaknya masyarakat desa Purworejo yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia, menjadikan mereka bersikap lebih keras sesuai dengan yang ada didalam organisasinya yang mengarah terhadap sikap radikalisme, sikap tersebut didapat dari pengaruh pendidikan yang diemban masyarakat dari Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo milik Abu Bakar Ba’asyir. Pondok Pesantren tersebut memang sudah terkenal dengan pendidikan islam garis keras dan mengarah pada tindakan radikalisme bahkan disebut juga sebagai sarang teroris. Oleh sebab itu, masalah perusakan Masjid Al-Kautsar terjadi karena pengaruh dari kelompok masyarakat yang memiliki pemikiran radikal tersebut dan sulit untuk menanamkan sikap demokrasi.

“Disini banyak yang masuk islam garis keras, terutama sebelahnya masjid daerah Bayong. Banyak lulusan dari Ngruki Abu Bakar Ba’asyir mungkin fikirannya bisa terpengaruh dari sana, kan dia ngotot juga mau membubarkan Ahmadiyah. Mungkin bawaan dari radikalismenya itu kan baik dari FPI, HTI, Majelis Mujahidin, dan Pemikiran Abu Bakar Ba’asyir”. (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.)

Kemunculan Majelis Mujahidin yang ada di Desa Purworejo memperparah kompromi untuk meniadakan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Kemunculan kelompok baru seperti Jemaat Ahmadiyah yang menjadi tamu di desanya seolah menjadi ancaman besar bagi kelompok radikal dan berfikir untuk segera dibubarkan. Salah satu cara meniadakan anggota Jemaat Ahmadiyah adalah dengan adanya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah yang

bertujuan sebagai peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk tidak terus menyebarkan dakwah dan merekrut anggota baru untuk masuk bergabung bersama Jemaat Ahmadiyah. Sikap intoleran dan tidak terima dari kelompok penentang semakin menjadi dan berani setelah ditetapkannya Fatwa MUI pada tahun 2005 dan SKB Tiga Menteri yang seolah menjadi tunggangan bagi kelompok intoleran untuk mendiskriminasi Jemaat Ahmadiyah.

“Iya kita menghormati hanya bisa menghormati kan sudah menjadi keputusan pemerintah. Cuma yang disini disayangkan banyak yang mengambil keputusan itu dalam arti negatif.”(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Menurut Ta’ziz sendiri, masalah konflik utama yang terjadi antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat adalah permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit diurai satu persatu. Bukan hanya tingkat toleransi yang rendah dari masyarakat maupun aparat desa, tetapi juga masalah kesalah pahaman dari masyarakat mengenai Jemaat Ahmadiyah, SKB Tiga Menteri dianggap sebagai sumbu yang disalah artikan oleh masyarakat sehingga masyarakat bersikap intoleran, radikal, dan melakukan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang dianggap sah karena dilindungi oleh kebijakan pemerintah.

“Intinya masalah sangat komplek, tidak adanya pemahaman dari masyarakat sendiri dan pihak dari masyarakat yang radikal dan tidak menerima ajaran agama baru di desanya sendiri. Adanya kepentingan dari kelompok tertentu yang tidak ingin Ahmadiyah ada di Desa Purworejo.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB)

Awal mula kemuculan Fatwa MUI pada tahun 2005 menghambat pendirian masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo. Meskipun Masjid sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah tetap saja dari segelintir orang ada yang tidak senang dan mencoba untuk mencegah pembangunan masjid tersebut. Bahkan masjid tersebut sempat mangkrak karena adanya surat perjanjian bersama antara Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Desa Purworejo yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk tidak meneruskan pembangunan masjid Al-Kautsar yang sudah dimulai sejak tahun 2003.

“Kalau penyerangan tidak ada, cuman gini suatu kita mau bangu masjid ada sekelompok terutama dari pihak aparat pemerintah desa yang pada saat itu memberitahukan kepada kita untuk tidak membangun karena membawa nama masyarakat. Kalau anarkis tidak pernah, Cuma ini perusakan pada tahun 2016 saja.” (Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Salah satu ketentuan dalam SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Diskriminasi terhadap Ahmadiyah juga diperkuat dengan adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah yang terbit pada tahun 2008⁴⁷.

⁴⁷ Fabian Januarius. 2016. *Masjid Ahmadiyah di Kendal Dirusak Massa tak Dikenal*. Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/11224741/masjid.ahmadiyah.di.kendal.dirusak.mass.a.tak.dikenal> pada 4 mei 2019 pukul 19.07 WIB

Dalam praktiknya, larangan MUI tidak diindahkan dan justru kerap disebut memicu tindak kekerasan atas nama agama. Ketika ditanya lebih lanjut mengapa isi fatwa yang sama tak diindahkan dilapangan sehingga terjadi tindakan diluar hukum Ketua umum MUI. Menurut Ma'ruf Amin, kekerasan yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah di lapangan yang membawa dasar fatwa MUI, menurutnya adalah sebuah penyalah tafsiran dan penyalahgunaan fatwa dalm bentuk tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan.

Menurut penjelasan Ma'ruf Amin, melakukan *sweeping* tidak diperkenankan bagi masyarakat, dari pihak MUI juga sudah sering melakukan teguran kepada masyarakat yang melakukan hal tersebut. Beliau mengungkapkan jika *sweeping* tidak diperkenankan, melakukan tindakan penghancuran dan pengrusakan masjid Ahmadiyah jelas tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh pihaknya. Menurutnya, Ahmadiyah dipercayai sesat, tetapi melakukan tindakan penganiayaan, pengrusakan, pendzaliman, pemukulan, sama sekali tidak dibenarkan⁴⁸.

Masyarakat intoleran masih banyak yang melakukan penistaan, penolakan, dan tindak diskriminasi lainnya yang merugikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, tindak kekerasan masyarakat intoleran semakin leluasa. Selain SKB, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang berisi tindak diskriminasi Jemaat Ahmadiyah dan seakan mendukung meniadakan kelompok minoritas ini. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang pelarangan

⁴⁸ Nurmulis Rekso Utomo.2017. *Ketua MUI Ingatkan Siapapun Melakukan Sweeping Akan Berhadapan dengan Hukum*. Tribunnews.com diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/22/ketua-mui-ingatkan-siapapun-melakukan-sweeping-akan-berhadapan-dengan-hukum> pada 5 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

penyebaran ajaran Ahmadiyah menjadi sumbu kekerasan yang dapat menyulut amarah dan tindakan kekerasan dari masyarakat yang menentang ajaran Ahmadiyah.

Berbagai peraturan mulai dari pemerintah tingkat kota, kabupaten hingga provinsi bermunculan tentang pelarangan Ahmadiyah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 yang merupakan sebuah penegasan dari Fatwa MUI tahun 1980, yang menetapkan aliran Ahmadiyah berada diluar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam.

Tabel 3.3
Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pelarangan Ahmadiyah

No.	Pejabat yang membuat Peraturan	Bentuk Peraturan	Waktu/Tanggal
1.	Gubernur Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan terhadap segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	4 Maret 2011
2.	Bupati Lebak	Peraturan Bupati Lebak No. 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk altivitas Jamaah Ahmadiyah	8 Maret 2011
3.	Walikota Depok	Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	9 Maret 2011
4.	Bupati Serang	Peraturan Bupati Serang No. 8 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	10 Maret 2011
5.	Bupati Konamwe Selatan	Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 1 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	17 Maret 2011
6.	Gubernur Sumatera Barat	Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	25 Maret 2011
7.	Walikota Bekasi	Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	13 Oktober 2011

8.	Gubernur Sulawesi Selatan	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	4 Maret 2011
9.	Gubernur Banten	Peraturan Gubernur Banten No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	3 Maret 2011
10.	Gubernur Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	28 Februari 2011
11.	Walikota Samarinda	Peraturan Walikota Samarinda No. 200/160/BKPPM.1.11.2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	25 Februari 2011
12.	Bupati Pandeglang	Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	21 Februari 2011
13.	Gubernur Sumatera Selatan	Peraturan Gubernur Selatan No. 583/KPTS/BAN tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	1 September 2008
14.	Kabupaten Kuningan	Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	Dikeluarkan pada tahun 2015
15.	Kabupaten Sintang	Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	18 Februari 2005
16.	Kabupaten Garut	Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	9 Agustus 2005
17.	Walikota Cianjur	Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah	17 Oktober 2005
18.	Walikota Cimahi	Perintah Walikota Cimahi, Itoc Tochija, tentang Pelarangan Ahmadiyah	6 Mei 2008
19.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pelarangan 13 aliran agama termasuk Ahmadiyah	Dikeluarkan pada Oktober 2005
20.	Kabupaten Sukabumi	Peraturan Bersama No. 143/2006 tentang penutupan tempat-tempat ibadah Ahmadiyah	20 Maret 2006

Sumber : Buku Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia Hal 11-12.

Selama ini MUI menghiraukan dampak atas fatwa yang dikeluarkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyaknya kelompok-kelompok yang menggunakan fatwa yang digunakan untuk melegitimasi tindakan intoleransi. Namun, dari beberapa kasus yang terjadi dan menggunakan fatwa untuk melakukan aksi tersebut pihak MUI seolah diam dan tidak bertanggungjawab atas fatwa yang telah mereka keluarkan. MUI seolah tidak mempertimbangkan aspek sosial dari fatwa yang mereka keluarkan. Seharusnya fatwa tidak hanya mempertimbangkan dalil-dalil agama, tetapi juga harus melihat dan mempertimbangkan dari kondisi sosial masyarakat serta implikasi terhadap fatwa yang dikeluarkan⁴⁹.

Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok terjadi pada tahun 2001 tepatnya di Desa Pocor Timur Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penyerangan dan tindak anarkis dari masyarakat didasari oleh Fatwa MUI dan Peraturan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dengan nomor Keputusan 11/IPK.32.2/L-2III.3/1183 tahun 1983 tentang pelarangan terhadap kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Penyerangan kembali terjadi pada tahun 2006, tindakan kekerasan berupa pengusiran dan pembakaran rumah serta penjarahan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pengusiran Jemaat Ahmadiyah Cabang Poncor dilatar belakangi oleh penolakan dari masyarakat mayoritas yang menganggap bahwa ajaran Ahmadiyah sesat.

⁴⁹ Nurmulis Rekso Utomo.2017. *Ketua MUI Ingatkan Siapapun Melakukan Sweeping Akan Berhadapan dengan Hukum*. Tribunnews.com diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/22/ketua-mui-ingatkan-siapapun-melakukan-sweeping-akan-berhadapan-dengan-hukum> pada 5 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok, berawal dari kasus yang terjadi di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1998. Akibat dari tindak kekerasan yang terjadi, terdapat lima rumah, satu masjid dan satu mushola milik Jemaat Ahmadiyah hancur terbakar. Kekerasan selanjutnya terjadi pada tahun 2001, bertepatan di Desa Pancor mengakibatkan kerusakan delapan puluh satu rumah, satu masjid, delapan toko, dan satu mushola hancur dan dijarah. Serangan kembali terjadi pada tahun 2005 yang mengakibatkan enam rumah hangus terbakar, delapan belas rumah rusak berat, dua sepeda motor dan satu sepeda hangus terbakar dan harta benda dijarah.

Gambar 3.4
Rumah Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur Dirusak Massa



Perusakan salah satu Rumah Jemaat Ahmadiyah oleh warga di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

(Foto : Tirto.id, 20 Mei 2018)

Selain di Lombok, kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah di Surabaya juga mengalami tindak diskriminasi dan intimidasi. Peraturan Gubernur no. 188/94/KPTS/012/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Timur yang dicetuskan setelah turunnya Fatwa MUI dan Surat

Keputusan Bersama Tiga Menteri. Kegiatan dakwah dan kegiatan agama lainnya semakin berkurang⁵⁰.

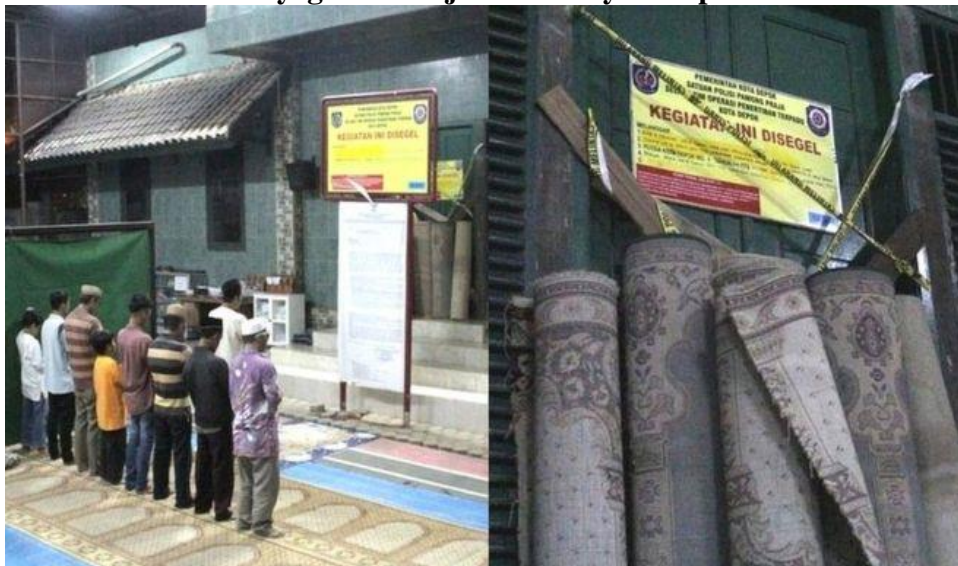
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2001 tentang Pelarangan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat memicu masyarakat untuk melakukan tindak intimidasi terhadap warga Cikeusik, Pandeglang Banten sehingga mengakibatkan 5 korban luka-luka dan 3 orang meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan Negara kuat intoleran dan menyerang kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan kelompok mayoritas. Masyarakat minoritas seakan tidak diindahkan untuk memilih kebebasan memeluk keyakinan dan kebebasan beragama.

Diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia terjadi lagi di Kota Depok. Kali ini Pemerintah Kota Depok menyegel Masjid Al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah. Penyegelan dilakukan hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 yang merupakan penyegelan ketujuh yang dialami Masjid Al-Hidayah. Sebelumnya Pemkot Depok telah menyegel masjid tersebut pada tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 dan Februari 2017. Penyegelan didasarkan oleh Fatwa MUI, SKB 3 Menteri, Pergub 2011. Mereka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang menyebarkan paham mereka yang sudah didasarkan pada Fatwa MUI⁵¹.

⁵⁰ Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas*, Jurnal milik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta : Pusat Dokumentasi Elsam Hal (1).

⁵¹ Rohmaytin Bonasir. 2018. *Masjid Ahmadiyah Ditutup Paksa di Indonesia, Dibangun Megah di Inggris*. BBCNews.com diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42363620> pada 5 mei 2019 pukul 16.00 WIB.

Gambar 3.5
Penyegelan Masjid Al-Hidayah Depok



(Foto : Bbc.com, 7 Juni 2017)

Pada tahun 2012, masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya dirusak oleh kawan Front Pembela Islam (FPI) pada April 2012. Segerombolan FPI mengaku bahwa awalnya mereka hanya akan memasang spanduk penolakan Ahmadiyah di gerbang Masjid, namun berakhir dengan penyerangan Masjid dan perusakan bangunan Masjid, mulai dari jendela, kaca sampai pelemparan bom Molotov. Hingga mengakibatkan dua Jemaat lanjut usia terjatuh saat dikejar massa. Tercatat bahwa ini merupakan bukan kali pertama pengrusakan masjid ditempat ini, peristiwa ini terjadi ke empat kali dengan kasus yang serupa.

Kasus penistaan lain terjadi pada 15 Juli 2005 berupa penyerbuan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sedang melakukan *Jalsah Salanah* atau pertemuan tahunan yang terjadi di Parung, Bogor Jawa Barat dan dibubarkan oleh ribuan massa. Insiden ini menimbulkan beberapa bangunan di Kampus Mubarak, Parung, Bogor mengalami kerusakan dan beberapa rumah milik Jemaat Ahmadiyah juga mengalami kerusakan. Kekerasan yang lain terjadi di daerah

Manislor pada tanggal 13 dan 18 Desember dilatar belakangi oleh persaingan elit lokal. Penyerangan tersebut mengakibatkan tujuh orang terluka, delapan rumah rusak dan dua masjid dirusak oleh pihak penyerang dan lima masjid lainnya disegel oleh satpol PP.

Ahmadiyah Qadian di Jawa Barat, Lombok, Surabaya dan beberapa kota lain sudah terbiasa dengan penolakan dan kekerasan bahkan pengusiran seperti yang terjadi di Lombok Barat⁵². Menurut Setara Institute antara tahun 2007- 2009 terjadi pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah terjadi sebanyak 286 pelanggaran⁵³. Catatan Setara Institute, pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah pada tahun 2007 sebanyak 15 pelanggaran, 193 pelanggaran pada tahun 2008, 33 pelanggaran pada tahun 2009 dan 50 pelanggaran pada tahun 2010⁵⁴.

Ta'ziz mengungkapkan bahwa setelah diterbitkannya Fatwa MUI pada tahun 2005 membuat aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo untuk menyebarkan dakwah menjadi sangat terbatas dan dalam keadaan tertekan. Disusul dengan terbitnya SKB Tiga Menteri tentang Peringatan Dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, menjadikan Jemaat Ahmadiyah seakan benar-benar ditakuti dan dilarang keberadaannya. Menurut Ta.ziz, terbitnya SKB tersebut didasari oleh keamanan terhadap Akidah dan Tauhid bagi umat Islam.

“Alasan mereka mengeluarkan SKB itu kan karena katanya sebagai keamanan Akidah dan Tauhid. Masalah Akidah dan Tauhid didalam buku yang ditulis Mirza Ghulam Ahmad juga masih sama, Mirza Ghulam Ahmad

⁵² Abdul Gaffar.2013.*Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara : Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB*. Jurnal Sosiologi Islam,3 (2) Hal. 30

⁵³ Setara Institute.2010.*Atas Nama Ketertiban dan Keamanan*. Jakarta : Setara Institute.

⁵⁴ Ismail Hasani dan Bonnar Tigor. 2010.*Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute. Hal 78

masih mengikuti islamnya Rasulullah SAW dari sunah-sunahnya.”(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Ditetapkannya SKB tersebut didasari oleh fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI sebelumnya. Menurut MUI, Jemaat Ahmadiyah dinilai berbeda dalam hal Akidah dan Tauhid dengan umat Islam pada umumnya. Menurut Ta’ziz, fatwa yang dikeluarkan MUI tidak benar dengan apa yang sebenarnya diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah. Menurut Ta’ziz, perbedaan penetapan Fatwa antara dahulu dengan sekarang adalah jika dahulu fatwa ditetapkan untuk menyelesaikan masalah, berbeda dengan fatwa sekarang. Fatwa yang ditetapkan sekarang justru membuat masalah baru terutama bagi masyarakat minoritas Jemaat Ahmadiyah.

“Tidak ada fatwa dari ulama terdahulu itu untuk membuat masalah gitu tidak ada. Sekarang saja membuat Fatwa bukan menyelesaikan masalah malah membuat masalah”.(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Selaku Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz merasa bahwa sosialisasi yang diadakan dari pemerintah desa dengan Komnas HAM sangat aneh. Pasalnya, dalam sosialisasi yang digelar antara Pemerintah Desa dengan Komnas HAM beserta Tokoh Agama yang diundang membahas mengenai penyelesaian atas kasus Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Namun, mengapa justru Jemaat Ahmadiyah tidak mendapatkan Undangan atas sosialisasi yang diadakan.

“Padahal kan yang memiliki masalah dari kami, kalau ga diundang gini kan bagaimana ada pendekatan rasa, maksudnya ketika kami diundang dalam forum kan setidaknya ada perwakilan dan kita bisa bicara disitu. Jadi, mediasinya itu ga jalan baik dari Pemerintah maupun LSM apa itu belum ada.”(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Ta’ziz juga menilai bahwa sikap dari pemerintah dirasa kurang tegas dalam menyikapi masalah yang dialami Jemaat Ahmadiyah. Tidak ada pembelaan, perlindungan atau kebebasan yang diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk memilih kepercayaan yang mereka yakini. Sehingga menyebabkan tindakan intoleran yang dilakukan dari masyarakat yang tidak senang dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa mereka.

“Wujud dari adanya sikap intoleran yang masih ada menjadi kompleks sekali masalahnya tidak hanya dari masyarakat tetapi juga sampai ke pemerintahnya juga yang dirasa kurang tegas.”(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Sikap Kepala Desa yang tidak netral menurut Jemaat Ahmadiyah menjadikan mereka sulit untuk mencari pembelaan dari orang nomor satu didesa mereka. Menurut Jemaat Ahmadiyah, sikap tidak netral dari Kepala Desa mulai terlihat sejak beliau menjadi aktivis untuk memberhentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar sebelum beliau menjabat menjadi Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa juga dinilai sebagai provokator atas tindakan anarkis perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Bukti menjadi provokatornya adalah pada postingan di Grup Facebook milik Desa Purworejo tersebut.

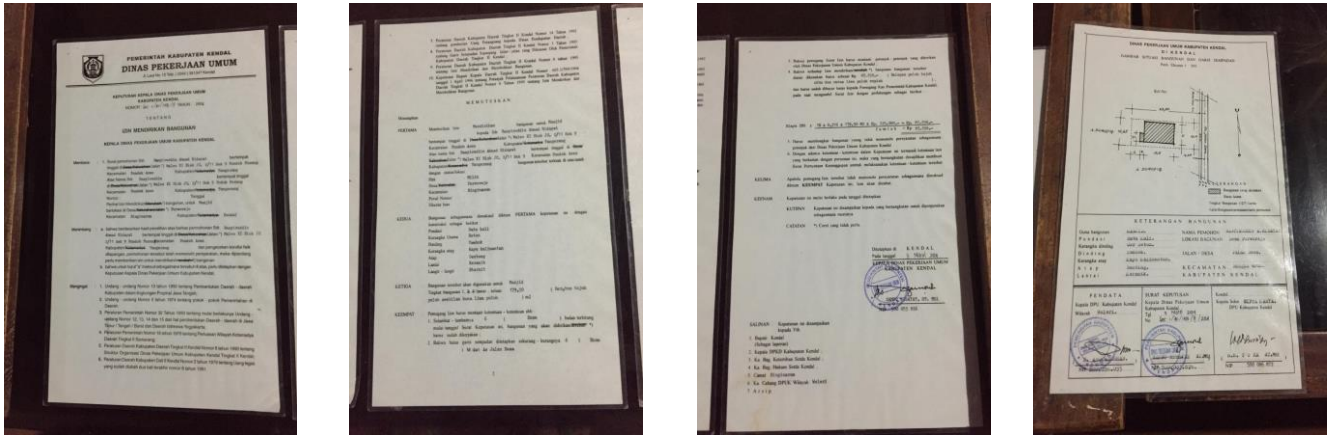
“Ternyata di Facebook juga disebarin ada gitu, kumpulannya lagi bahas apa tuh ada direkam disana di Balai Desa dan pas rapat terakhir. Dari Kepala Desanya emang udah kelihatan ga netral malah dia yang kayak ya gatau ya yang mendukung buat perusakan.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah telah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal pada tahun 2004. Tetapi Jemaat Ahmadiyah masih sulit untuk melakukan pembangunan. Sebelum terjadi perusakan di tahun 2016, sebelumnya Masjid Al-Kautsar juga sering mendapat tentangan dari warga masyarakat dan aparat desa untuk melanjutkan pembangunan masjid. Pada tahun 2012 Masjid Al-Kautsar pernah di segel oleh pihak Satpol-PP Kendal. Tetapi hal tersebut tidak mengurungkan niat Jemaat Ahmadiyah untuk tetap membangun Masjid dan melaksanakan aktivitas di Masjid Al-Kautsar. Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa penyegelan dari Satpol PP tidak bersifat resmi jika bukan perintah dari putusan pengadilan.

“Kalau sebelumnya hanya pelarangan dan sempat juga penyegelan di tahun 2012 dari aparat pamungpraja Kendal. Pembangunan juga masih tetap berlanjut meskipun masih disegel. Kan itu mestinya penyegelan atas perintah hukum dalam arti Pengadilan, kalau dari Satpol PP kan lucu, apa mereka tidak tahu hukum.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.)

Meskipun IMB sudah ada di tangan Jemaat Ahmadiyah, tetapi tetap saja Jemaat Ahmadiyah selalu diperingati oleh warga masyarakat desa purworejo untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar. Adapun bukti IMB yang dipegang oleh Jemaat Ahmadiyah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6
IMB Masjid Al-Kautsar Purworejo



IMB Masjid Al-Kautsar di Desa Purworejo yang menjadi pegangan Jemaat Ahmadiyah untuk tetap bertahan dan melanjutkan Pembangunan Masjid Al-Kautsar.
(Foto : Peneliti)

Penyerangan terhadap Masjid Al-Kautsar hanya terjadi pada satu malam saat insiden perusakan masjid tersebut saja, sebelumnya tidak pernah terjadi kasus serupa hanya saja bentuk intimidasi dari masyarakat dan pemerintah desa setempat. Bentuk intimidasi seperti penyegelan masjid dari Muspika Kecamatan, sikap penolakan dan pelarangan masyarakat terhadap penerusan pembangunan Masjid Al-Kautsar yang masih dalam tahap pembangunan.

“Kalau perusakan hanya terjadi pada satu malam itu saja. Sebelumnya hanya seperti bentuk intimidasi saja dari masyarakat. Terus pernah juga disegel masjidnya dari satpol-pp kendal itu pada tahun 2012. Selain itu paling kayak pelarangan-pelarangan aja sih mbak ga boleh bangun masjid gitu-gitu.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Adanya grup desa di media sosial *Facebook* milik masyarakat Desa Purworejo memudahkan koordinasi masyarakat dan diskusi online yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo. Kepala Desa Purworejo sebagai pemantik di grup tersebut meminta pendapat kepada warganya untuk mengambil sikap dari

pembangunan Masjid Al-Kautsar yang tetap dibangun oleh Jemaat Ahmadiyah meskipun beberapa kali telah ditolak oleh sebagian besar masyarakat desa purworejo.

“Mereka melakukan koordinasi melalui Grup di Media Sosial Facebook mbak, disana ada rencana-rencana mereka dari perencanaan sampai eksekusi. Nanti mbak lihat saja nama Grupnya “Purworejo Bersatu untuk Maju”, nama grupnya bersatu untuk maju tapi kok melakukan perusakan. Disana juga ada ada Pak Lurah yang masuk dalam grup. Mereka membahas akan melakukan perusakan Masjid Al-Kautsar ini ya dari Grup Facebook itu.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Gambar 3.7
Grup Facebook Desa



Grup Facebook Desa yang digunakan untuk membahas perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah
(Foto : Grup Fb Desa oleh Peneliti)

Penghancuran dilakukan pada saat malam hari pukul 23.00 WIB dalam suasana hujan lebat. Terdengar suara gemuruh penghancuran yang didengar oleh Hajar dan Ibunya dari kediamannya. Pemukulan suara bangunan terdengar hanya berlangsung selama kurang lebih 2 jam dengan suara ramai orang-orang disekitar masjid. Kemudian, dari Kamzah juga mendengar suara gemuruh yang berasal dari selatan seperti suara gemuruh perobohan bangunan. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar, warga dan Jemaat Ahmadiyah baru mengetahui saat pagi hari setelah Masjid Al-Kautsar sudah dihancurkan.

“Awalnya itu orang-orang berkumpul di Balai Desa, kemudian beramai-ramai ke Masjid dan melakukan perusakan. Ada tetangga saya, belakang rumah ini pas malam-malam sepulang dari Balai Desa itu gedor-gedor pintu saya. Terus ngasih tau kalau malam ini disuruh untuk tidak ke Masjid. Ya saya bingung toh mbak, ya bilang iya saja, lagian malam-malam ke Masjid mau ngapain, sudah jam sebelas juga.”(Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Perusakan dilakukan oleh masyarakat desa intoleran secara kolektif saat kejadian dan alat yang digunakan berupa linggis dan palu besar (godem) yang menjadi barang bukti saat di Pengadilan. Perusakan dilatar belakangi dari beberapa orang yang tidak menyetujui Jemaat Ahmadiyah mendirikan masjid sendiri dan menyebarkan dakwah atau aktifitas keagamaan lainnya di Masjid Al-Kautsar. Kebencian-kebencian dari kelompok masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah memicu timbulnya fitnah yang tersebar di masyarakat. Simpang siur kabar tentang Ahmadiyah yang memiliki Nabi dan Syahadat berbeda menjadi alasan utama kebencian dari sekelompok orang. Berikut

keterangan dari Aziz yang merupakan salah satu anggota dari Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo.

“Faktor kebencian mbak dan ketidak senangan sama Jemaat Ahmadiyah di desa ini. Motifnya ya mungkin pengen kita (Jemaat) bubar dan masuk ke agama yang sama dengan mereka yang mayoritas. Karena kita di desa sendiri dianggap sesat, keluar dari islam, kitab suci berbeda, nabi berbeda dan lain-lain.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.)

Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah hanya terjadi pada satu malam. Menurut pengakuan Mas’ud dan Hajar, pelaku pengrusakan tidak hanya dua orang, hal tersebut diduga karena mustahil bagi dua orang pelaku untuk merobohkan bangunan hanya dalam dua jam dan menggunakan linggis dan godem. Pada malam yang sama sebelum pengrusakan berlangsung, ada perkumpulan di Balai Desa dan setelah perkumpulan terdengar suara motor menuju ke Masjid Al-Kautsar dan selang beberapa menit terdengar suara seperti pukulan-pukulan tembok dan bangunan.

“Yang dimasukkan sebagai barang bukti di pengadilan cuma satu linggis dan satu palu besar saja sebagai barang bukti. Terus yang ditetapkan tersangka ada dua orang. Ya sebenarnya kami tidak percaya wong itu melakukannya ramai-ramai kok ga cuma satu dua orang saja.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.)

Gambar 3.8
Warga melakukan diskusi untuk menindak lanjuti terkait Masjid Al-Kautsar yg tetap dibangun oleh Jemaat Ahmadiyah



(Foto : Grup Fb Desa Purworejo oleh Peneliti)

Tak puas hanya merusak Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, barang-barang milik Jemaat Ahmadiyah yang ada didalam masjid juga ikut dijarah. Seperti jam dinding, kitab, lemari bahkan sampai pintu. Setelah perusakan Masjid diketahui oleh Ta'ziz, kemudian kasus ini dilaporkan ke Polsek Gemuh untuk diproses dan diselidiki. Pada keesokan hari setelah perusakan masjid, Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si bersama pemerintah daerah kabupaten kendal mendatangi lokasi kejadian untuk melihat kasus tersebut. Namun setelah itu, tidak ada tindakan apapun dari Pemerintah daerah Kendal. Kasus hanya di bawa ke Pengadilan dan tersangka dimaafkan oleh Jemaat Ahmadiyah.

Gambar 3.9
Kondisi Masjid Al-Kautsar setelah dirusak Warga



(Foto : Peneliti)

Perusakan Masjid sudah sejak lama direncanakan, mulai dari pelarangan pembangunan sampai yang terparah pada tahun 2016 yaitu perusakan masjid yang berlangsung selama 3 jam di satu malam. Kronologi terjadi dari adanya perkumpulan warga di Balai Desa pada malam hari. Kemudian pada tengah malam setelah perkumpulan warga beramai-ramai menuju ke Masjid Al-Kautsar dengan membawa godem atau palu besar dan linggis sebagai alat untuk merobohkan bangunan. Suara pukulan dari godem sangat keras sehingga menyebabkan suara pukulan terdengar. Perusakan masjid terjadi pada malam hari saat cuaca sedang hujan, tidak ada Jemaat Ahmadiyah yang berada di sekitar masjid.

Lokasi masjid jauh dari tempat tinggal Jemaat Ahmadiyah karena masjid dibangun diantara perbatasan desa. Semua Jemaat Ahmadiyah berdiam diri dirumah masing-masing karena sudah tengah malam dan hujan sangat lebat. Jemaat Ahmadiyah baru mengetahui bahwa masjid sudah rata dengan tanah dan hanya tersisa puing-puing bangunan dan barang-barang berserakan pada pagi hari setelah kejadian, bahkan tak sedikit barang-barang yang ada didalam masjid juga ikut dijarah oleh orang-orang yang melakukan perusakan. Barang-barang tersebut seperti semen, pasir, hingga pintu kayu masjid tak luput dari jarahan orang-orang yang melakukan perusakan tersebut. Dalam kasus tersebut, hanya ada dua orang yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut, tetapi tersangka tidak sampai dipenjara karena dari pihak Jemaat Ahmadiyah telah memaafkan.

Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah merupakan perusakan masjid pertama yang terjadi di Desa Purworejo. Sebelumnya, tidak pernah terjadi kasus perusakan rumah ibadah di Desa Purworejo. Padahal, masjid Al-Kautsar merupakan masjid baru yang sedang dalam tahap pengerjaan 60%. Pada siang hari sebelum malam perusakan, Jemaat Ahmadiyah baru menyelesaikan pemasangan baja ringan bagian depan masjid sebelum pemasangan atap masjid.

“Iya mbak, yang dirusak hanya masjid itu saja. Masjid masih dibangun dan dalam keadaan hampir jadi, kemudian dirusak begitu saja. Saya juga tidak tahu pas kejadian malam itu, saya baru tahu ketika pagi hari setelah dirusaknya masjid tersebut.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB)

Gambar 3.10
Gambar Masjid Al-Kautsar setelah dirusak warga



(Foto : Cnn.com, 23 Mei 2016, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160523221536-12-132972/masjid-ahmadiyah-di-kendal-dirusak-sekelompok-orang>)

Perusakan terparah memang terjadi pada tahun 2016 saja. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya bukan berupa perusakan terhadap masjid namun upaya pemberhentian pembangunan masjid selalu diteriakan oleh masyarakat dan perangkat desa. Sikap intoleransi terus ditunjukkan kepada Jemaat Ahmadiyah ketika mereka mencoba membangun rumah ibadah mereka sendiri. Tak jarang nada keras dan kesal dari warga sering diterima Jemaat Ahmadiyah ketika Jemaat sedang melakukan pembangunan Masjid Al-Kautsar.

“Dulu tahun 2012 setiap mau bangun tuh selalu dihentikan secara paksa, misalnya nih kita mau pasang genteng atau kita lagi bangun apa tuh yang dibelakang itu pasti suruh berhenti sama perangkat desa atau sama orang-orang yang tidak suka itu teriak-teriak turun-turun gitu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Setiap usaha yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah untuk tetap membangun masjid selalu dipandang salah dan menyimpang dari sudut pandang masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2004, masyarakat sempat mendesak Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh untuk menghentikan pembangunan dan menandatangani surat perjanjian dengan warga. Karena dalam kondisi terdesak dan di ambak-ambak masa, Ta'ziz menuruti dan menandatangani surat kesepakatan tersebut untuk meredakan amukan masa yang memaksa untuk menghentikan pembangunan masjid.

Dengan adanya surat kesepakatan pemberhentian pembangunan tersebut, Masjid Al-Kautsar sempat mangkrak dan Jemaat Ahmadiyah kesulitan untuk merenovasi masjid tersebut. Dalam setiap kesempatan, Jemaat Ahmadiyah kembali merenovasi masjid milik mereka meskipun dalam setiap tahap pembangunannya, mereka selalu mendapatkan pelarangan dan tentangan dari warga masyarakat maupun aparat desa Purworejo yang melarang pembangunan Masjid Al-Kautsar tetap dilanjutkan.

“Sebenarnya kalau dari dulu itu tahun 2012 sering disuruh buat berhenti. Pokoknya kalau ada kegiatan membangun selalu dibilangin suruh berhenti.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Perusakan Masjid Al-Kautsar yang paling parah hanya terjadi dalam satu malam. Sebelum perusakan masjid dilakukan, segerombolan orang berkumpul di Balai Desa dan pada akhirnya beramai-ramai untuk menuju ke Masjid Al-Kautsar.

“kan saya denger suara motor, suara orang lewat rame-rame sepulang dari Balai Desa. ya tak kira orang-orang habis kumpulan di Balai Desa terus pas udah selesai pulang ke rumah masing-masing.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah yang tidak mengira akan terjadi perusakan masjid besar-besaran milik Jemaat Ahmadiyah dan Jemaat Ahamdiyah juga tidak menduga jika suara-suara motor yang melewati rumahnya akan menuju ke Masjid Al-Kautsar dan merobohkan bangunan Masjid yang masih dalam tahap pembangunan dalam waktu 2-3 jam saja. Jemaat Ahmadiyah tidak menaruh curiga sama sekali kepada setiap pengendara motor yang lewat di samping rumahnya. Karena yang mereka tahu hubungan antar warga masyarakat desa berjalan baik-baik saja dan tidak ada konflik diantara mereka.

“Lha kok ternyata malah ke Masjid Al-Kautsar terus dirusak. Rame-rame itu mbak, ga mungkin kalau Cuma dua orang. Ya denger saya dari rumah suara “dueng-dueng” kayak orang menggempur rumah gitu. Terus ya pas paginya dapat kabar ternyata Masjid Al-Kautsar dirusak. Perusakan ga lama kok, wong jam dua malam juga udah sepi ga ada suara-suara lagi.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Kronologi terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah tidak diketahui secara langsung oleh para Jemaat Ahmadiyah tetapi para Jemaat Ahmadiyah baru mengetahui setelah keesokan harinya setelah mengetahui bahwa masjid benar-benar hancur dan mengumpulkan tanda-tanda semalam yang diterimanya dari sanak saudara maupun tetangga yang menghimbau mereka untuk tetap dirumah dan mencegah mereka untuk pergi ke masjid.

“Sebenarnya memang kejadiannya tuh wajtu itu kan om saya pernah pulang kerja tuh malem-malem katanya lihat rame-rame di Balai Desa pas malem-malem itu. Tapi kan kita posisinya dirumah nih, jadi kita yaudah namanya orang kumpul kan kita gatau dan mau su’usdzon juga kan yaudah gapapa.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Kronologi terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar dari Jemaat Ahmadiyah tidak ada yang mengetahui secara pasti. Tetapi dari bukti-bukti dan tanda-tanda yang diterima saat malam sebelum kejadian dapat menjelaskan kronologi. Selain dari aduan para tetangga juga dari gerak-gerik masa yang ikut merusak Masjid Al-Kautsar tersebut.

“Dihancurin pake digempur gitu, engga sampai pembakaran. Posisinya itu masih malem, kita kan juga lagi tidur waktu itu posisinya hujan deras jam setengah sebelas atau jam sebelas malam. Masjidnya dirusak, digempur parah ya parah habis semua kok.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Hujan deras disertai angin dan petir yang terjadi pada saat malam perusakan masjid tidak memungkinkan Jemaat Ahmadiyah untuk mengunjungi Masjid Al-Kautsar. Meskipun ada suara-suara benturan bangunan yang terdengar sampai ke rumah para Jemaat, Jemaat Ahmadiyah masih berfikiran positif dan tidak menghiraukan suara tersebut. Rusaknya masjid tersebut baru diketahui pada pagi hari oleh Jemaat Ahmadiyah dan sudah menjumpai bahwa masjid kebanggaannya telah menjadi puing-puing bangunan dan tidak dapat digunakan untuk beribadah lagi.

“Posisinya juga itu pas hujan. Masjid jadi bener-bener ga bisa digunain lagi, dinding-dinding bolong semua, baja ringan rusak, pintu kayu dijarah, jam dinding masjid diambil, kitab-kitab juga ga ada. Hilang semua isi masjid yang masih tersisa tinggal puing-puing bangunannya aja.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Pada malam kejadian, tetangga Kamzah datang menemuinya dan menghimbau untuk tetap dirumah dan tidak pergi ke Masjid Al-Kautsar. Tidak lama setelah diberitahu oleh tetangganya, Kamzah mendengar suara-suara pemukulan bangunan dari arah selatan tempat Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah dibangun. Kamzah tidak mengira bahwa suara tersebut merupakan suara-suara pemukulan bangunan Masjid Ahmadiyah oleh masyarakat Desa Purworejo. Kamzah yang masih penasaran dengan pemberitahuan tetangganya tidak pernah menyangka jika hal tersebut merupakan isyarat terhadap Kamzah bahwa masjid milik Jemaat Ahmadiyah akan dirusak dan dihancurkan.

“Terus tidak lama dari itu, saya mendengar suara dueng-dueng dari selatan kayak orang lagi gempur bangunan gitu. Kemudian pagi harinya kan saya ke sawah itu ya mbak, lewat Masjid Al-Kautsar itu, ya kaget mbak lha koku dah rusak parah sampai ga bisa digunain lagi. Atap dirusak, dinding jadi bolong semua dan hancur lebur ga bisa digunain lagi. Dan ternyata tetangga saya itu semalam ke rumah saya untuk mengamankan saya buat tidak ke Masjid karena ternyata masjidnya dirusak sama warga desa. (Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Diketahui bahwa perusakan Masjid Al-Kautsar tersebut dilakukan secara kolektif dan sudah terorganisir sebelum malam perusakan. Adanya grup di media sosial yang membuktikan bahwa perusakan masjid dilakukan bersama-sama pada tengah malam dan secara kolektif. Didalam grup tersebut terdaat diskusi yang dimulai dari pembicaraan Kepala Desa yang menanyakan kepada warganya terkait tindakan tegas yang akan dilakukan jika masjid tetap dibangun oleh Jemaat Ahmadiyah.

Gambar 3.11
Gambar Masjid Al-Kautsar setelah dirusak



(Foto : Kompas.com, 23 Mei 2016)



(Foto : Tribunjateng.com, 23 Mei 2016)

Semenjak terjadinya kasus perusakan Masjid Al-Kautsar tersebut, warga banyak yang mengira bahwa masjid tersebut sudah tidak digunakan lagi. Karena memang dari bentuk masjid sesudah dirusak sudah tidak dapat digunakan lagi. Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Kautsar menjadi tidak sesering dahulu sebelum masjid dirusak. Perbaikan masjid juga dirasa sangat sulit, selain harus memulai kembali dari nol, sopir mobil pengantar material bangunan juga menjadi takut untuk mengantarkan material ke lokasi Masjid Al-Kautsar semenjak terjadi kasus perusakan Masjid tersebut. Petugas PLN dari luar desa mereka juga takut untuk membantu memperbaiki aliran listrik masjid yang telah dirusak warga.

“Sepertinya kok sudah tidak digunakan lagi mbak akhir-akhir ini. Kalau waktu sehari-hari untuk sholat lima waktu dhuhur, ashar, dan maghrib itu kok sepertinya tidak digunakan.”(Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Pelaku yang merusak Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah memang dari kalangan orang yang tidak suka dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Bagi masyarakat yang menerima dan saling menghormati, mereka tidak dapat melakukan hal banyak untuk membantu Jemaat Ahmadiyah. Masyarakat

yang menerima hanya membiarkan saja tidak ikut mendiskriminasi dan tidak juga ikut menolong.

“Yang merusak ya dari masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah ini, kalau mereka yang suka ya membiarkan saja.”(Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Pelaku perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah telah ditetapkan oleh pengadilan sebanyak dua tersangka. Namun dibalik putusan dari pengadilan tersebut, menurut penuturan Kyai Mas’ud tidak mungkin jika hanya dua pelaku yang menjadi tersangka dalam kejadian tersebut. Salah satu pelaku diantara keduanya merupakan seorang yang tidak begitu mengerti mengenai agama, dan terkenal sebagai preman di desanya. Jika yang ditetapkan adalah mereka, maka masih menjadi tanda tanya besar apakah benar mereka adalah dalang dibalik kejadian perusakan masjid Al-Kautsar ini.

“Kata orang sih yang ditetapkan dua mbak, tetapi kayaknnya banyak itu ga cuma dua. Jatmiko sama Mujo.” (Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Pelaku perusakan Masjid Al-Kautsar yang ditetapkan oleh pengadilan, sebenarnya bukan benar-benar dalang dibalik peristiwa perusakan Masjid Al-Kautsar tersebut. Meskipun para terduga pelaku sudah dimaafkan dan diakhiri dengan berdamai dari kedua belah pihak, namun dari pihak Jemaat Ahmadiyah masih penasaran dengan pelaku sebenarnya yang mengendalikan mereka. Pelaku terduga Jatmiko merupakan merupakan seorang preman kampung di desanya dan dia tidak mungkin mengurus urusan kebencian terhadap suatu agama tertentu. Pelaku kedua yaitu Mujo. Mujo adalah seorang warga Desa Purworejo yang

tinggal di dukuh Bayong. Dukuh Bayong memang terkenal dengan barisan islam garis keras dan adanya organisasi Majelis Mujahidin Indonesia serta kelompok Muhammadiyah yang tidak senang dengan Jemaat Ahmadiyah. Pengaruh dari lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi Mujo sehingga berbuat nekat dan bersedia untuk menghancurkan Masjid Al-Kautsar. Namun, Mujo hanyalah warga biasa yang tidak memiliki kekuasaan di desanya.

“Sebenarnya mereka bukan benar-benar pelaku, mereka hanya dijadikan umpan saja. Namanya Jatmiko dan Mujo dari orang Bayong dan Laban. Pelaku dari luar Jemaat Ahmadiyah. Jatmiko itu orang yang pemabuk, tukang nomor kalo dikasih uang aja itu mbak.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

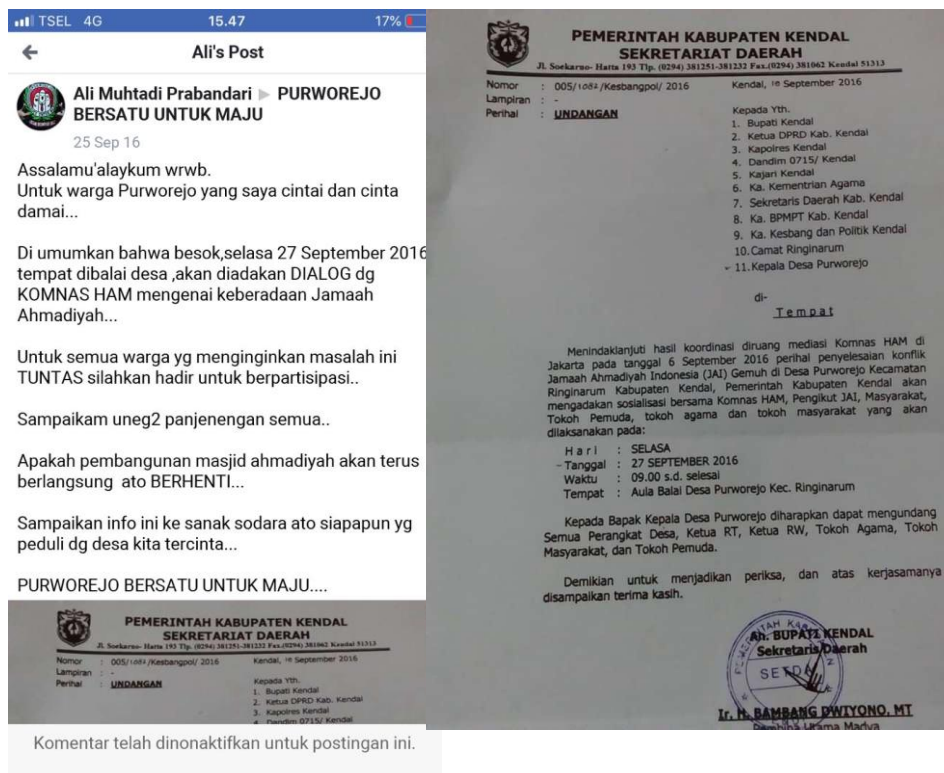
Dalang dibalik kasus perusakan masjid tersebut masih belum diketahui hingga saat ini. Namun, dugaan terkuat dari bukti-bukti yang sudah terkumpul adalah Kepala Desa Purworejo beserta ajudannya. Kepala Desa merupakan seseorang yang tinggal di dukuh Bayong, dari lingkungannya tersebut banyak yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa beliau juga termasuk salah satu dari kelompok islam garis keras tersebut, karena dari pengakuan masyarakat beliau juga masuk dalam partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Disusul dengan bukti sebelum beliau menjadi kepala desa, beliau merupakan seseorang yang aktif untuk mengencarkan pembangunan Masjid Al-Kautsar untuk segera dihentikan.

“Diusutnya kan baru tadi dua orang yang dijadikan pelaku, padahal kan ga cuma dua orang yang ngehancurin masjidnya.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Menurut Ta'ziz kecenderungan masyarakat yang tidak mengetahui Ahmadiyah versi sumbernya menjadi akar permasalahan yang fatal dan dapat menimbulkan sikap intoleran masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah. Kesalahpahaman pengertian Ahmadiyah yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, membuat Jemaat Ahmadiyah sulit untuk menjelaskan siapa diri mereka sebenarnya. Tidak adanya ruang yang disediakan pemerintah untuk menjelaskan Ahmadiyah yang sesungguhnya membuat Jemaat Ahmadiyah sulit untuk menjelaskan siapa diri mereka yang sebenarnya kepada masyarakat dan kabar miring mengenai Jemaat Ahmadiyah tetap tumbuh subur di lingkungan Desa Purworejo. Sehingga penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah tidak bisa dihindarkan.

“Dulu sempat ada juga upaya dari Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan Komnas HAM mengadakan sebuah forum gitu di balai desa, setelah terjadi perusakan Masjid Al-Kautsar ini. Tetapi anehnya kalau mau menjadi mediasi untuk Jemaat Ahmadiyah kok malah perwakilan dari kami tidak diundang. Ya itu acaranya besar ada podium-podiumnya juga, menghadirkan tokoh-tokoh agama juga, lha tapi kan itu lucunya malah dari pihak Jemaat Ahmadiyah tidak diundang didalam forum.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta'ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Gambar 3.12
Surat Undangan Dialog Komnas HAM



(Foto : Grup Fb Desa Purworejo oleh Peneliti)

Meskipun telah ada undangan untuk diskusi bersama dengan Komnas HAM, dari pihak Jemaat Ahmadiyah mengaku tidak menerima surat edaran tersebut dari pemerintah desa. Diskusi tanggal 27 September 2016 tetap berlangsung dengan dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat desa purworejo dan tokoh agama desa Purworejo. Meskipun membahas mengenai Jemaat Ahmadiyah, namun pihak Ahmadiyah tidak ikut dilibatkan dalam dialog tersebut. Dialog diselenggarakan di Balai Desa untuk membahas keberlanjutan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo.

Adanya kesalah pahaman dari warga setempat dan ujaran kebencian dari kelompok islam garis keras menjadi pemicu adanya konflik yang terjadi antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Desa Purworejo. Menurut Ta'ziz,

provokasi yang tersebar di masyarakat menyebabkan kesalah pahaman, tidak adanya ruang untuk berbicara dan menjelaskan bagaimana Ahmadiyah sebenarnya juga menjadi faktor yang menyebabkan Jemaat Ahmadiyah dipandang sebelah mata oleh masyarakat desa.

“Sudah terprovokasi dan ga mau tahu lagi bagaimana dan pa itu Ahmadiyah versi sumbernya. Taunya dari internet atau fatwa MUI yang belum tentu kebenarannya. Kalau dia menyerap dari sumbernya yang asli itu ya bakal tahu dan ga akan seperti itu”.(Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Selain kebencian karena kesalah pahaman perusakan masjid juga didasari oleh ketakutan dari kelompok masyarakat mayoritas jika anggotanya malah ikut bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Kyai Mas’ud berfikir bahwa adanya persebaran agama baru di desa mereka dapat menyebabkan anggotanya berpaling dan ikut dalam Jemaat Ahmadiyah.

“Ada beberapa warga desa yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah ini, baik itu dari kelompok NU sendiri maupun dari kelompok Muhammadiyah. Selain itu, juga ada ketakutan dari warga khususnya Tokoh Agama seperti saya jika pada akhirnya murid-murid saya atau golongan dari saya jadi masuk ke aliran Ahmadiyah bukan NU lagi, dan ketakutan yang sama yang dirasakan dari kelompok Muhammadiyah” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa perusakan Masjid Al-Kautsar memang karena adanya rasa ketidak sukaan dari masyarakat terhadap kehadiran aliran kepercayaan baru di desa mereka. Tetapi para Jemaat Ahmadiyah selalu merespon dengan baik meskipun mereka mendapat anggapan orang-orang disekitarnya yang kurang baik dan belum bisa menerima kehadiran mereka di desanya. Dari pengakuan salah satu Jemaat Ahmadiyah, orang-orang yang tidak suka dengan

mereka adalah dari organisasi yang tergabung dalam MMI dan Muhammadiyah garis keras.

“Kalo di depannya sih kita baik-baik saja walaupun disitu tuh kan banyak yang NU dan Muhammadiyah kan. Nah yang rada ngelihat in kalau ga sukanya itu dari Muhammadiyah tapi dari Muhammadiyah tuh bukan yang kayak yang lain yang ada moderatnya kayaknya bukan yang itu, soalnya mereka ada yang beberapa partainya ada PKS jadi ada yang kolot-kolot gitu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Hubungan antar warga masyarakat desa Purworejo dengan Jemaat Ahmadiyah jika dilihat dari luar dan aktivitas keseharian baik-baik saja dan seperti tidak ada masalah yang terjadi diantara mereka. Jemaat Ahmadiyah tidak pernah menyangka jika masjid yang dibangun dari tahun 2003 saat ini harus diperbaiki lagi dan memulai dari awal. Pembangunan masjid Al-Kautsar sudah mencapai hingga 60%, namun sejak perusakan masjid hanya menyisakan puing-puing bangunan dan aliran listrik yang menerangi masjid karena telah dirusak oleh warga saat kejadian perusakan masjid pada tahun 2016.

“Kronologinya ya itu, kita mau pasang baja ringan diatasnya itu kan sudah berdiri itu bajanya kemudian malamnya dihancurkan. Pasang baja ringannya dari pagi sampai sore, sudah hampir selesai pemasangan baja ringannya. Pembangunannya sudah mencapai hingga 60% lebih lah cuma belum ada gentengnya itu, cuma malamnya dihancurkan, sekalian listriknya juga dihancurkan speedometranya itu. Kemudian bagian belakang yang tidak untuk sholat kan yang paling penting juga dihancurkan itu, dihancurkan semua. Kalo sekarang sudah hancur semua. Bangunannya masih berdiri. Lokasi masjidnya di dekat Rowobranten. Posisi masjidnya ada di sebelah sawah persis.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.)

Dari pandangan Kyai Mas'ud aktivitas kemasyarakatan berjalan seperti biasa dan tidak terjalin konflik antara warga masyarakat dengan Jemaat Ahmadiyah. Kyai Mas'ud merupakan seorang Tokoh Agama NU yang ada di Desa Purworejo. Kyai Mas'ud menerima dan menghormati hadirnya Jemaat Ahmadiyah di desa

Purworejo. Beliau mencoba untuk menghormati satu sama lain meskipun banyak simpang siur yang memberitakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah sesat, berbeda dan keluar dari Islam. Sebagai Tokoh Agama di desanya, beliau menghimbau kepada murid dan anggotanya untuk saling menghormati dan tidak melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah.

“Kalau hubungan antar masyarakatnya sih biasa saja mbak, dari rumor yang beredar bahwa Jemaat Ahmadiyah itu sesat yaudah kita mencoba menghormati saja tanpa harus mendiskriminasi.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB)

Pada siang hari sebelum perusakan masjid terjadi, para Jemaat Ahmadiyah sudah hampir menyelesaikan bangunan masjid hingga mencapai 60% dan tahapan ini sudah sampai pada pemasangan baja ringan untuk alas atap masjid. Tetapi sayangnya, pada malam hari tanggal 22 Mei 2016 terjadi tindak arogan dari kelompok intoleran yang melakukan perusakan Masjid Al-Kautsar. Tidak sedikit kerugian yang harus ditanggung Jemaat untuk memperbaiki masjid dari awal kembali.

“Ratusan mbak, setiap kita mau bangun itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Semen, Baja Ringannya aja udah berapa itu puluhan juta itu. Bangunannya yang tembok-tembok kan sudah rusak itu, kalo daftar kerugiannya berapa kurang tau. Mungkin nanti bisa tanya ke Bapak yang tahu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Kerugian yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah bukan jumlah yang sedikit. Sedikitnya 200 juta rupiah total kerugian yang dialami Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah harus menanggung sendiri akibat kerusakan masjid Al-Kautsar. Tidak ada ganti rugi yang mereka terima baik dari pemerintah maupun dari pelaku

perusakan. Kerugian harus mereka tanggung sendiri tanpa adanya pembelaan dari masyarakat luar maupun dari pemerintah. Adapun perbandingan gambar masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah sebelum dirusak dan sesudah dirusak oleh masyarakat desa purworejo :

Gambar 3.13
Gambar Masjid Al-Kautsar sebelum dan sesudah dirusak



(Foto : Afsokh Jemaat Ahmadiyah)



(Foto : Peneliti)

Korban jiwa dalam kasus ini memang tidak ada, tetapi kerugian material yang harus Jemaat Ahmadiyah tanggung memang tidak sedikit, kerugian mencapai 200 juta rupiah untuk memulai kembali pembangunan renovasi dari awal. Saat ini, masjid yang berhasil direnovasi Jemaat hanya pada bagian belakang dan biasa digunakan untuk sholat Jum'at berjama'ah. Tidak banyak warga yang tahu mengenai pembangunan renovasi kecil-kecilan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah, demi menghindari cercaan warga Jemaat Ahmadiyah rela membangun Masjid Al-Kuatsar tersebut dimalam hari dan menggunakan dana pribadi dari masing-masing Jemaat.

“Tidak ada korban jiwa. Tapi kalau materi banyak dari Jemaat Ahmadiyah rugi besar.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Gambar 3.14

Gambar Masjid Setelah dirusak Masyarakat



(Foto : Peneliti)



(Foto : Peneliti)

Perasaan tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah menjadikan masyarakat intoleran buta hati dan tega untuk berbuat anarkis. Tidak adanya pihak ketiga antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat intoleran menjadikan Jemaat Ahmadiyah semakin lemah karena memiliki masa yang lebih sedikit dari pada masyarakat intoleran di desa mereka. Kabar burung yang tersebar di desa mereka semakin memperkeruh suasana dan menjadikan masyarakat intoleran semakin tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah.

“Ya karena adanya beberapa pihak yang tidak senang dengan Jemaat Ahmadiyah ini mbak.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Kepala Desa yang saat ini masih menjabat juga menjadi salah satu pelopor perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Dari pengakuan Jemaat

Ahmadiyah, sebelum menjabat menjadi Kepala Desa beliau sempat menjadi aktivis salah satu orang yang dengan sukarela menyebarkan tanda tangan untuk pemberhentian pembangunan Masjid Al-Kautsar, dan setelah menjabat Masjid berhasil diberhentikan pembangunannya karena sudah hancur lebur dan para Jemaat Ahmadiyah harus memulai dari awal kembali untuk membangun Masjid.

“Dari Kepala Desanya kan sebelum dia menjawab menjadi Kepala Desa dia tuh orang yang paling aktif nyebarin tanda tangan buat pemberhentian pembangunan masjid, jadi setelah dia jadi Kepala Desa ya gatau tiba-tiba udah hancur aja gitu.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Adanya usaha dari kelompok intoleran untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah adalah membujuk warga untuk ikut mendesak agar Jemaat Ahmadiyah mau menandatangani surat pemberhentian pembangunan masjid yang dibuat oleh kelompok intoleran. Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz terpaksa menuruti permintaan masyarakat untuk menandatangani surat perjanjian tersebut untuk meredakan emosi warga masyarakat yang memintanya untuk segera menandatangani surat perjanjian tersebut.

“Bapak dulu pernah tanda tangan pemberhentian masjid dalam kondisi tertekan karena didesak orang-orang rame yang memicu buat tanda tangan pemberhentian masjid. Masalah penyegekan masjid juga dipicu karena tanda tangan paksa orang-orang yang marah pada saat itu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Kejadian perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah dilakukan pada tengah malam saat Jemaat Ahmadiyah sudah tertidur. Fakta dilapangan, perusakan masjid tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja. Perusakan Masjid Al-Kautsar dilakukan beramai-ramai dengan konsolidasi yang sebelumnya

dilakukan di Balai Desa untuk mengatur strategi. Kejadian perusakan masjid hanya berlangsung selama kurang lebih 2 jam saja dan dalam keadaan hujan deras disertai petir.

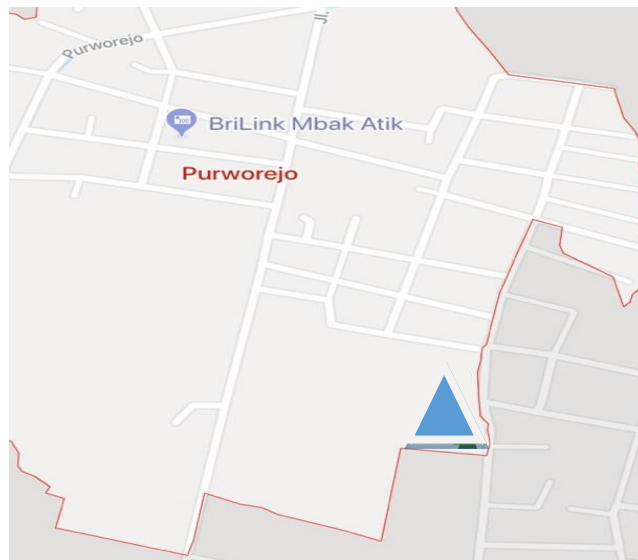
“Posisinya beber-bener lagi hujan deres terus ada petir. Jadi tuh mereka ga cuma ngehancurin tapi juga ngambilin gitu lucunya. Pintu masjid dibawa, semen juga ga ada, terus selang buat air itu juga ga ada, alat-alat itu banyak yang diambil.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB)

Kerugian yang ditanggung oleh Jemaat Ahmadiyah mencapai 200 juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit untuk memulai membangun lagi dari awal. Sulitnya akses untuk membeli bahan material dari took bangunan juga menjadi kendala. Semenjak insiden perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, dan berita sampai keluar banyak dari sopir pengantar bahan material takut untuk mengantarkan bahan baku ke Masjid Al-Kautsar. Ketakutan dari sopir pengantar material membuat Jemaat Ahmadiyah semakin sulit untuk merenovasi rumah ibadah milik mereka.

Lokasi Masjid Al-Kautsar dengan rumah para Jemaat Ahmadiyah memang terpaut jarak yang lumayan jauh. Masjid Al-Kautsar sengaja dibangun diantara perbatasan desa antara Desa Purworejo dengan Desa Rowobranten. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Jemaat Ahmadiyah yang ada diluar desa purworejo untuk lebih dekat dengan masjid. Selain itu juga untuk menjaga jarak antara masjid-masjid yang lain yang ada di Desa Purworejo yang lebih dulu dibangun dari pada Masjid Al-Kautsar.

“Soalnya majid itu kita buat ditengah-tengah desa antara desa kami dengan desa mereka kan biar posisinya enak ditengah-tengah.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Gambar 3.15
Peta Letak Masjid Al-Kautsar di Desa Purworejo



Lokasi Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
 (Foto : Peneliti melalui Google Maps)

Kasus perusakan Masjid Al-Kautsar tentu menyebabkan kerugian besar bagi Jemaat Ahmadiyah. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian yang harus ditanggung oleh Jemaat Ahmadiyah mencapai 200 juta terhitung dari bangunan yang dirusak, properti yang dijarah dan beberapa material bangunan untuk membangun masjid tersebut yang ikut diambil oleh pelaku perusakan Masjid Al-Kautsar.

“Kalau korban jiwa ga ada, tapi korban material dari Jemaat Ahmadiyah semuanya. Karena benar-benar kita bangun Masjid ini juga memakai uang iuran anggota.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Meskipun masjid dalam keadaan parah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, namun niat dan usaha dari Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki masjid sedikit demi sedikit dan tanpa sepengetahuan warga mulai membuahkan hasil. Pasalnya, para Jemaat Ahmadiyah mulai merenovasi masjid kembali pada bagian belakang tanpa sepengetahuan warga lain dan menggunakan alat dan bahan seadanya.

“Yang belakang yang dirusak itu perbaiki sudah digunakan lagi. Tapi belum digunakan. Pertama kita menggunakan untuk sholat Ied pas lebaran tahun 2016. Setelah lebaran itu kita baru mulai pakai seminggu sekali untuk Jumatan. Kemudian tahun berikutnya kita gunakan untuk sholat terawih sampai sekarang. Untuk masalah penerangan pakai lampu emergency.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB)

Setelah kejadian perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah tersebut, masyarakat tidak ada yang merasa khawatir atau bersimpati kepada Jemaat Ahmadiyah. Dari pemerintah desa juga tidak menjadi penengah untuk meredakan masalah tersebut, bahkan kepala desa ikut membatasi kebebasan beragama yang ada di desa purworejo. Kepala Desa yang sudah mengetahui bahwa masjid telah dilakukan pembangunan ulang usai perusakan oleh para Jemaat Ahmadiyah, kepala desa meminta agar Masjid Al-Kautsar bagian depan tetap dibiarkan rusak dan jangan dibangun lagi.

“Pak Kelapa Desanya bilang yang depan jangan dulu. Terus saya bilang sama kepala desanya, jangan khawatir pak kita bangunnya yang belakang, kalau yang depan saya tidak tahu kapan akan dibangun kembali” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Aziz, di Desa Purworejo, tanggal 25 Maret 2019, pukul 17.00 WIB)

Selain kisaran harga yang sangat banyak untuk memulai membangun masjid kembali, sulitnya akses untuk membeli bahan material dari toko bangunan juga menjadi kendala bagi Jemaat Ahmadiyah. Semenjak insiden perusakan Masjid Al-

Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, dan berita sampai keluar banyak dari sopir pengantar bahan material takut untuk mengantarkan bahan material ke Masjid Al-Kautsar. Ketakutan dari sopir pengantar material membuat Jemaat Ahmadiyah semakin sulit untuk merenovasi rumah ibadah milik mereka.

Gambar 3.16
Gambar Masjid Al-Kautsar Paska Perusakan



(Foto : Peneliti)



(Foto : Peneliti)

Gambar 3.17
Gambar Masjid Al-Kautsar Paska Perusakan dan Setelah di Renovasi



(Foto : Instagram Hajar umi)

(Foto : Peneliti)

Tercatat sejak masa orde baru hingga kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat banyak kasus intoleran yang dilakukan kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas secara umum dan terhadap Jemaat Ahmadiyah secara khusus. Tercatat oleh Setara Institute, pengrusakan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal adalah bukan kali pertama, tetapi merupakan kasus ke 114 kasus kekerasan dan perampasan HAM Jemaat Ahamdiyah terhitung dari tahun 2007 yang sudah terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2015, Setara Institute mencatat ada 197 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, peristiwa pelanggaran yang terjadi sebanyak 134 peristiwa, sedangkan tindakan pelanggaran sebanyak 177 pelanggaran. Hendardi menyebutkan, ada 17 institusi negara yang berkontribusi melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada tahun 2015. Tiga besar institusi negara yang menjadi pelanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan ialah pemerintah kabupaten/kota sebanyak 31 tindakan, kepolisian sebanyak 16 tindakan dan Satpol PP sebanyak 15 tindakan.

Sepanjang tahun 2016, terjadi 20 peristiwa intoleran serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, 16 kasus masuk kategori intoleran, sisanya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang justru dilakukan oleh negara. Yayan M Royani dari Elsa mengatakan, jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir cenderung naik turun. Dalam catatan mereka, kasus yang terulang dan menonjol setidaknya melibatkan tiga hal, yaitu Ahmadiyah, Syiah dan pembangunan gereja diberbagai wilayah. Salah satu kasus yang menonjol di Jawa Tengah tahun 2016 adalah perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kendal⁵⁵.

⁵⁵ Nurhadi Sucahyo. 2017. *Tindakan Intoleran di Jawa Tengah Meningkat*. Voaindonesia.com diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/tindakan-intoleran-di-jawa-tengah-meningkat/3687733.html> pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Merusak Masjid Al-Kautsar Milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut;

a. Faktor Minoritas

Jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah organisasi baru yang lahir ditengah masyarakat Desa Purworejo. Masyarakat Purworejo sendiri mayoritas beragama Islam yang terbagi kedalam dua aliran yaitu pertama masyarakat Islam yang menganut aliran NU dan masyarakat Islam yang menganut aliran Muhammadiyah. Dan ada satu organisasi sosial di tengah masyarakat NU dan Muhammadiyah yaitu Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia sendiri terkenal dengan sebutan Islam Garis Keras. Sedangkan aliran Ahmadiyah sendiri merupakan aliran yang paling baru yang ikut beradaptasi di Desa Purworejo.

“Berdirinya mulai resmi itu tahun 2000, jadi berdiri cabang dapat pengesahan tahun 2000 tanggal dan bulannya ya saya lupa itu tahun 2000.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB)

Kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa Purworejo tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut didasari oleh simpang siur yang tersebar kepada masyarakat bahwa aliran Ahmadiyah berbeda dengan aliran agama Islam secara umum, selain itu juga adanya beberapa kelompok Islam Garis Keras yang tidak setuju dengan hadirnya Jemaat

Ahmadiyah ditengah masyarakat Purworejo. Dari jumlah kuantitas penganut Ahmadiyah juga tidak seimbang dengan jumlah dari penganut Islam NU dengan Islam Muhammadiyah yang ada di Desa Purworejo.

Hal ini menjadikan Jemaat Ahmadiyah rentan mengalami sikap diskriminasi dari masyarakat sekitar. Seperti pada kasus-kasus sebelumnya masyarakat minoritas selalu menjadi sasaran empuk bagi kelompok intoleran untuk didiskriminasi atau bahkan sampai melakukan tindak kekerasan seperti perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Faktor minoritas menjadi dasar alasan tidak diterimanya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo dan pemanfaatan faktor minoritas bagi kelompok intoleran untuk lebih mudah melakukan tindakan tidak menyenangkan seperti pelarangan pembangunan masjid milik Jemaat Ahmadiyah sampai perusakan masjid yang sedang dalam masa pembangunan hingga hancur lebur dan tidak dapat digunakan lagi.

Berbagai kabar ketidak benaran mengenai Jemaat Ahmadiyah telah menyebar luas di masyarakat, hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menganggap Ahmadiyah berbeda dari Islam pada umumnya. Kabar ketidak benaran ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mempengaruhi masyarakat menyetujui untuk merusak Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah.

“Fitnah-fitnah yang masih berkembang di lingkungan yang sumbernya bukan dari Ahmadiyah sendiri.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Jumlah Jemaat Ahmadiyah yang tidak sebanding dengan masyarakat Muhammadiyah, NU maupun Islam garis keras yang ada di Desa Purworejo menyebabkan kekuatan dari Jemaat Ahmadiyah cenderung lemah dan kalah dengan masyarakat mayoritas. Lemahnya kekuatan Jemaat Ahmadiyah di desa Purworejo, membuat mereka rentan mendapatkan sikap diskriminasi dari masyarakat di desanya.

“Cuman ada ya beberapa dari tetangga yang sebelah sana tuh seperti misalnya akikah, makanan kan syukuran sama seperti Islam yang lainnya, dari tetangga ada yang tidak mau menerima. Tapi memang ada beberapa yang tidak suka.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Dengan jumlah anggota Jemaat Ahmadiyah yang sangat sedikit, mereka hanya dapat pasrah dengan keadaan yang saat ini mereka hadapi. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, bahwa masyarakat minoritas seringkali menjadi target diskriminasi dari kelompok mayoritas yang belum bisa menerima kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat.

“Yaudah pasrah saja mbak, kita sudah ikhlaskan semua. Cuma bisa diam saja lha mau bagaimana lagi.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Sebagai masyarakat minoritas, Jemaat Ahmadiyah tidak dapat berbuat banyak atas peristiwa yang menimpa mereka. Adanya dialog di depan publik atau masyarakat masih mereka harapkan sampai sekarang. Harapan mereka untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya. Permintaan Jemaat Ahmadiyah untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya dalam ruang dialog terbuka

untuk publik hingga saat ini masih belum dikabulkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

“Masalahnya kami tidak diberikan ruang untuk menjelaskan bagaimana kami sebenarnya. Jadi masyarakat yang lain menganggap kami salah seperti versi MUI.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Kebutuhan Jemaat Ahmadiyah selain mereka diterima dalam masyarakat, mereka juga sangat berharap, pemerintah segera memberikan ruang dialog terbuka bagi Jemaat Ahmadiyah untuk menyampaikan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya kepada masyarakat desa purworejo. Selain untuk meluruskan berita yang sudah terlanjur beredar luas juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak seburuk apa yang masyarakat pikirkan selama ini. Sebagai kaum minoritas di desanya, Jemaat Ahmadiyah berharap dapat diterima dengan baik dan dapat hidup berdampingan dengan rukun dan penuh toleransi.

“Sebenrnya kita cuma butuh ruang untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak seperti yang diberitakan orang-orang di desa.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Pelaku yang dijadikan tersangka oleh pihak pengadilan, menurut Jemaat Ahmadiyah bukan benar-benar pelaku yang memelopori tindakan perusakan Masjid Al-Kautsar. Menurut para Jemaat Ahmadiyah, ada dalang dibalik pelaku yang dijadikan tersangka. Bahkan pelaku yang ditetapkan menjadi tersangka merupakan sebuah taktik yang dilakukan

dalang untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa pelaku yang dituduhkan kepada Jatmiko bukan benar-benar pelaku yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan Jatmiko terkenal dengan orang yang tidak terlalu peduli dengan urusan agama, karena masyarakat juga tahu bahwa Jatmiko merupakan seorang preman kampung yang ada didesanya. Jadi jelas jika Jatmiko tidak terlalu memperdulikan urusan agama.

“Tapi ada kecenderungan juga kalau dari pelaku ini juga suruhan orang lain, ya mungkin karena ada yang tidak suka. Soalnya yang saya tahu juga pelaku ini tidak terlalu peduli dengan agamanya bisa dikatakan seorang preman lah di desa sini wong sukanya juga mabuk-mabukan, kalau dikasih uang baru deh dia mau gerak gitu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perbedaan masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas menjadi hal yang menonjol yang ada pada desa tersebut. Jemaat Ahmadiyah hanya terdiri dari lima KK dari seluruh KK yang ada di Desa Purworejo. Kesenjangan sosial yang terjadi diantara keduanya menimbulkan lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah untuk membela diri.

Masyarakat minoritas tidak dapat berbuat banyak atas diskriminasi yang mereka terima. Kesenjangan jumlah anggota dengan masyarakat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Lemahnya kekuatan yang dimiliki masyarakat minoritas, menjadikan masyarakat minoritas harus bertahan diatas diskriminasi yang mereka alami. Meskipun

demikian, Jemaat Ahmadiyah masih tetap bertahan untuk mempertahankan kelompok mereka dan masjid yang mereka miliki. Meskipun payung hukum tidak memihak kepada mereka, mereka masih tetap bertahan dengan apa yang mereka miliki sekarang. Kesenjangan kelompok yang terjadi antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas menjadi hal biasa dalam hidup bermasyarakat. Jemaat Ahmadiyah menganggap bahwa sudah menjadi resiko bagi kaum minoritas yang hidup ditengah masyarakat mayoritas.

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, salah paham memang menjadi sumber utama konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Jemaat Ahmadiyah. Kesalah pahaman dari masyarakat mayoritas terhadap Jemaat Ahmadiyah menimbulkan konflik sosial diantara keduanya. Masyarakat mayoritas menganggap bahwa Jemaat Ahmadiyah merupakan aliran kepercayaan yang sesat dan menyesatkan. Masyarakat percaya dengan ketetapan MUI yang menyebutkan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan serta keluar dari agama islam.

Kesalah pahaman ini membawa dampak yang tidak baik untuk hubungan kemasyarakatan diantara mereka. Jemaat Ahmadiyah tidak diberikan ruang untuk menjelaskan siapa dan bagaimana mereka sesungguhnya dihadapan publik. Kesalah pahaman inilah yang membawa sikap kebencian dari masyarakat mayoritas terhadap Jemaat Ahmadiyah. Konflik tidak bisa dihindarkan dan konflik sosial terparah adalah saat

terjadi perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo oleh masyarakat mayoritas yang salah paham dengan Jemaat Ahmadiyah.

Faktor minoritas yang menjadi kelemahan Jemaat Ahmadiyah memudahkan kelompok masyarakat intoleran yang memiliki jumlah anggota lebih banyak lebih mudah untuk mempengaruhi anggotanya dan masyarakat lain untuk ikut melancarkan aksinya dalam menghilangkan Jemaat Ahmadiyah dari desa mereka. Meskipun sedikit, Jemaat Ahmadiyah tetap percaya dan berpegang teguh terhadap hukum bahwa hak untuk mendapatkan kebebasan beragama adalah hak setiap warga negara Indonesia meskipun termasuk dalam kategori masyarakat minoritas.

“Bapak dulu pernah tanda tangan pemberhentian masjid dalam kondisi tertekan karena didesak orang-orang rame yang memicu buat tanda tangan pemberhentian masjid.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Sebagai kelompok minoritas yang ada dilingkungan masyarakat mayoritas membuat Jemaat Ahmadiyah harus bisa lebih sabar dan ikhlas menerima setiap respon masyarakat yang berbeda dalam menilai mereka. Tidak dipungkiri bahwa adanya kelompok masyarakat yang tidak senang dengan kehadiran mereka membuat mereka tidak nyaman dengan perlakuan yang diberikan masyarakat mayoritas terhadap mereka.

“Tetapi mungkin memang ada satu atau dua diantara mereka yang menganggap Jemaat Ahmadiyah ini berbeda sehingga menimbulkan rasa tidak suka hingga kebencian kepada Jemaat Ahmadiyah. Namanya juga kelompok baru mbak, mesti ada yang tidak suka didalam masyarakat, ya kita terima-terima saja lha mau gimana lagi.”

(Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, perusakan terjadi karena adanya rasa kebencian dan kesalah pahaman dari masyarakat mayoritas terhadap Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah sebagai masyarakat minoritas di Desa Purworejo selalu tidak diberikan ruang untuk berbicara maupun menyatakan pendapat didalam forum yang digelar oleh pemerintah setempat. Saat pengadaan acara Forum Kebebasan Umar Beragama yang digelar oleh Muspika Ringinarum, perwakilan dari Jemaat Ahmadiyah menghadiri acara tersebut. Namun, pada saat acara berlangsung kesempatan untuk menyatakan pendapat dari Jemaat Ahmadiyah tidak disediakan oleh panitia setempat. Meskipun Jemaat sudah mengangkat tangan untuk memberi tanggapan.

Selain adanya forum ditingkat kecamatan, adanya sosialisasi yang diadakan oleh Komnas HAM di Desa Purworejo untuk membahas Kerukunan Umat Beragama, Jemaat Ahmadiyah tidak diberi undangan untuk menghadiri acara tersebut oleh pemerintah desa setempat. Padahal acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama setempat, tetapi kepada Jemaat Ahmadiyah yang seharusnya lebih membutuhkan forum tersebut justru tidak diberikan ruang untuk sekedar hadir, berbicara maupun menyatakan pendapat. Diskriminasi yang dialami Jemaat Ahmadiyah juga dirasakan dilingkup Kecamatan, tidak diberikannya kebebasan berpendapat mendapat mereka semakin bungkam dan sulit untuk menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sesungguhnya.

Faktor minoritas telah menjadi masalah tersendiri bagi Jemaat Ahmadiyah, meskipun mereka dalam segi kuantitas masih sangat sedikit, tetapi mereka percaya bahwa kekuatan akan tercipta jika Jemaat Ahmadiyah bisa berjalan bersama. Mereka tetap bersemangat untuk mempertahankan Jemaat Ahmadiyah hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas. Meskipun banyak masyarakat mayoritas yang melihat Jemaat Ahmadiyah hanya sebelah mata.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mendasari perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah tersebut juga didasari adanya faktor penerimaan dari masyarakat. Seperti yang telah diakui oleh Jemaat Ahmadiyah, beberapa masyarakat yang ada di Desa Purworejo tidak seluruhnya menerima kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Faktor penerimaan masyarakat menjadi landasan yang penting untuk dipahami dan dimengerti. Sikap penolakan baik dari Aparat Desa dan masyarakat sering dilontarkan pada saat Jemaat Ahmadiyah sedang melakukan pembangunan Masjid Al-Kautsar. Seperti berikut ungkapan dari salah satu Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo.

“Bukan perusakan tapi semacam kalo kita mau bangun tuh kayak misal dulu tahun 2012 setiap mau bangun tuh selalu dihentikan secara paksa, misalnya nih kita mau pasang genteng atau kita lagi bangun apa tuh yang dibelakang itu pasti suruh berhenti sama perangkat desa atau sama orang-orang yang ga suka itu teriak-teriak “turun-turun” gitu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Dalam kasus perusakan Masji Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perbedaan kepentingan antar kelompok sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusakan masjid tersebut terjadi. Perbedaan kepentingan agama menjadi alasan yang kuat terkait kasus perusakan masjid yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Seperti temuan dalam penelitian yang penulis lakukan, dari masyarakat desa purworejo yang melakukan perusakan terhadap masjid, selain adanya rasa kebencian yang kuat terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Menyadari adanya faktor sosial atas penerimaan masyarakat menjadikan konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Desa Purworejo tidak bisa terelakkan. Keduanya mempunyai kepentingan masing-masing. Masyarakat tidak menerima Jemaat Ahmadiyah di desa mereka, dan masyarakat tidak menyetujui adanya pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Di sisi lain, Jemaat Ahmadiyah sangat membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bersama anggotanya. Jemaat Ahmadiyah juga ingin memiliki rumah ibadah sendiri seperti masyarakat NU dan Muhammadiyah yang ada di desanya. Sayangnya, keinginan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Desa Purworejo.

“Kita ya nurut-nurut aja karena gamau ambil banyak konflik kan jadi di iyain aja, tapi ya kita ga bisa terus kalo mau kegiatan jemaat masa keliling di rumah-umah anggota terus, kita kan juga pengen sama si punya tempat peribadatan kan, kita juga nyebarin walaupun mereka juga resah atau ga suka dengan ajaran yang kita sebarin di masjid kita juga cuma mau sholat biasa aja gitu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Dalam tahapan kerusuhan massal, situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu. Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, situasi sosial yang terjadi di Desa Purworejo antara Jemaat Ahmadiyah dengan warga masyarakat sekitar berjalan baik-baik saja seperti tidak ada konflik diantara keduanya. Kegiatan bermasyarakat masih berjalan dengan lancar dan tidak ada yang saling membenci satu sama lain.

Namun, Jemaat Ahmadiyah menyadari adanya struktur sosial tertentu didalam masyarakat membuat hubungan antara Jemaat Ahmadiyah dengan warga masyarakat desa Purworejo menjadi renggang. Struktur sosial seperti munculnya kelompok-kelompok masyarakat intoleran membuat Jemaat Ahmadiyah mulai merasa di diskriminasi dan di intimidasi. Kelompok tersebut melahirkan suatu wacana dan menyebarkan kabar yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi keagamaan yang sesat. Struktur sosial tersebut membuat situasi sosial menjadi bergejolak dan mengakibatkan *cheos* pada malam perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo.

Masyarakat Desa Purworejo terus mendesak dan memaksa Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan Pembangunan Masjid Al-Kautsar. Jemaat Ahmadiyah tidak bisa melawan dan akhirnya menuruti kemauan masyarakat untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar untuk sementara waktu. Sulitnya akses untuk berbicara kepada publik menjadi kendala tersendiri bagi Jemaat Ahmadiyah. Beberapa forum yang pernah

diadakan oleh Pemerintah Desa maupun Muspika Kecamatan, penyampaian pendapat dari Jemaat Ahmadiyah tidak pernah diberi kesempatan. Forum yang diadakan seakan menjadi formalitas dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Dari dulu juga sebenarnya kita mau bangun dialog juga susah. Dulu pernah buat acara FKUB di Kantor Kecamatan atau dimana gitu saya luap, dulu kan Bapak saya pernah diundang, padahal waktu itu ngomongin masalah masjid waktu itu sebelum dirusak, ketika Bapak saya angkat tangan buat bicara tuh ga dikasih sama pihak sana. Jadi kayak perilaku outgrup gitu juga udah sering diterima.”(Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah merupakan aliran kepercayaan paling baru yang masuk di desa purworejo. Simpang siur kabar tentang Jemaat Ahmadiyah yang cenderung memojokkan Jemaat Ahmadiyah menjadi pertimbangan bagi masyarakat desa untuk menerima kehadiran mereka. Masyarakat yang kaku tidak setuju dengan adanya Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Perasaan sensitif tersebut muncul akibat masyarakat yang terlalu perasa dan tidak percaya dengan Jemaat Ahmadiyah. Perasaan takut akan Jemaat Ahmadiyah juga dialami oleh beberapa pihak ketika anggota kelompoknya justru berbalik ikut dengan Jemaat Ahmadiyah.

Masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo masih terbilang sangat baru dan masih muda. Ditambah dengan simpang siur berita dari luar membuat masyarakat tidak sepenuhnya dapat menerima kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Meskipun ada beberapa orang yang menerima kehadiran mereka, tetapi mereka hanya bisa diam dan tidak dapat membantu apapun.

“Kita ya sebenarnya kasian, kita ga apa-apa sih mbak, ya mereka mau buat masjid sendiri ya kita iyain aja kan sama-sama mau ibadah. Tetapi ya itu ada yang ga suka dengan mereka yang bilang kalau ajarannya itu sesat atau apalah gitu, tapi kalau dari kami ya udah membiarkan saja, kami menghormati setiap perbedaan yang ada, wong itu pilih mereka ya sudah.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Karena kekuatan Jemaat Ahmadiyah sangat lemah maka sangat mudah bagi kelompok intoleran untuk mencegah mereka menyebarkan dakwah hingga memiliki bangunan Masjid sendiri. Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah menjadi bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima Jemaat Ahmadiyah di Desa mereka, dan masyarakat yang menerima hanya bisa diam dan menyaksikan tanpa bisa membantu apapun.

Masyarakat yang tidak memahami hukum dengan baik, akan mudah dipengaruhi oleh berbagai tindak propaganda kelompok intoleran untuk meniadakan Jemaat Ahmadiyah dari desa purworejo. Secara hukum, pembangunan Masjid Al-Kautsar memiliki sifat sah dan telah memiliki IMB sejak tahun 2003. Masyarakat yang tidak paham mengenai hukum, tidak akan peduli dan mudah untuk diprovokasi oleh kelompok intoleran untuk ikut merusak masjid Al-Kautsar.

“Masyarakat yang tidak paham hukum akan mudah terprovokasi dari pihak-pihak radikal yang tidak senang dengan Jemaat Ahmadiyah.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa permasalahan yang dihadapinya sangat kompleks, salah satu yang paling berisiko adalah faktor dari akhlak atau pribadi masyarakatnya sendiri. Hal ini disebabkan karena akhlak yang mempengaruhi pola pikir dari masing-masing pribadi. Jika pribadi memiliki akhlak yang baik, maka perusakan tidak akan terjadi. Mereka akan berfikir dua kali untuk merusak masjid Al-Kautsar. Tetapi sebaliknya, jika memang dari pribadi mereka sudah ada perasaan tidak senang dengan Jemaat Ahmadiyah, maka mereka dengan senang hati untuk menghancurkan masjid milik Jemaat Ahmadiyah.

“Tidak hanya dari aparat desa, tetapi juga akhlak dari masyarakat desanya sendiri.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Dalam perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, perbedaan kepentingan antar individu yang tidak menyukai adanya Jemaat Ahmadiyah di desa purworejo, mereka membuat sebuah koalisi yang kemudian membentuk menjadi kelompok manusia yang menentang adanya persebaran Jemaat Ahmadiyah di Desa Mereka. Dengan adanya kelompok-kelompok manusia tersebut, mereka mempengaruhi warga masyarakat untuk ikut membenci Jemaat Ahmadiyah untuk kepentingan mereka.

Kedatangan Jemaat Ahmadiyah ditengah-tengah masyarakat desa purworejo, tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat desa. Kedatangan Jemaat Ahmadiyah memicu datangnya konflik sosial yang ada di Desa Purworejo. Jemaat Ahmadiyah dianggap sebagai kelompok masyarakat

yang memiliki nilai-nilai berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan tersebut dianggap sebuah masalah bagi masyarakat yang intoleran. Perubahan-perubahan masyarakat kemudian memuncak menjadi kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah. Kebencian dari kelompok masyarakat mayoritas tersebut melahirkan konflik sosial yang terjadi pada mereka.

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perusakan terjadi akibat tindakan dari masyarakat intoleran yang tidak menerima Jemaat Ahmadiyah hadir didalam lingkungannya. Upaya penolakan-penolakan dari masyarakat dilihat dari berbagai diskriminasi yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah. Larangan-larangan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk berdakwah dilingkungannya sangat dibatasi dan dikecam oleh masyarakat sekitar. Pembangunan Masjid Al-Kautsar sebagai upaya Jemaat Ahmadiyah untuk lebih leluasa melancarkan dakwah dan melakukan keagamaan lainnya.

Masyarakat tidak setuju dengan pembangunan Masjid yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Meskipun berbagai prosedur persyaratan pembangunan masjid sudah dimiliki Jemaat, hal tersebut tidak mengurungkan niat masyarakat untuk tetap menolak adanya pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Dalam hal ini jelas terlihat adanya keterbatasan untuk melaksanakan kebebasan beragama di Desa Purworejo. Masyarakat melakukan pelanggaran HAM dalam kebebasan

beragama yang seharusnya menjadi hak bagi setiap orang untuk menentukan dan menjalankan agama sesuai dengan pilihannya.

Dalam tahapan kerusuhan massal, tekanan sosial diartikan sebagai suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan dan kekerasan tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan. Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, tekanan sosial yang terjadi diakibatkan karena adanya masyarakat mayoritas intoleran yang menganggap adanya perbedaan dalam kepercayaan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan yang dipercayai oleh umat Islam pada umumnya.

Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa organisasi Jemaat Ahmadiyah sudah berbadan hukum dan diakui oleh negara. Selain legalitas yang dimiliki Jemaat Ahmadiyah, banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Masjid Al-Kautsar sudah memiliki IMB dari pemerintah kabupaten Kendal sejak tahun 2003. Jemaat Ahmadiyah di mata masyarakat Desa Purworejo adalah organisasi yang liar dan tidak mentaati hukum. Adanya dari pihak TNI yang pernah mendatangi salah satu Jemaat Ahmadiyah dapat mempengaruhi pola pikir dari masyarakat menilai Jemaat Ahmadiyah.

“Perizinan masjid juga ini masyarakat tidak tahu. Kita dianggapnya dalam pandangan mereka itu liar”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Kedatangan pihak TNI di rumah salah satu Jemaat Ahmadiyah dinilai Ta’ziz hanyanya untuk menakut-nakuti Jemaat Ahmadiyah untuk tidak melanjutkan pembangunan Masjid Al-Kautsar. Ta’ziz menilai bahwa hal tersebut hanya sebagai tindakan intimidasi dari aparat desa yang bekerjasama dengan TNI untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar yang sudah memiliki izin untuk membangun. Ta’ziz menilai bahwa tindakan TNI tersebut sebagai faktor kepentingan untuk menakut-nakuti Jemaat Ahmadiyah dan mempengaruhi pola fikir masyarakat desa.

“Kalau ada sebagian aparat yang mendatangi kami kan jadi mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah. Kita kan juga tidak tahu bagaimana bisa aparat TNI kok sampai masuk ke rumah Jemaat Ahmadiyah, ya mungkin ada obrolan-obrolan kepentingan dari mereka.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Pihak masyarakat belum bisa menerima kehadiran agama baru di desa mereka. Sikap intoleran dari masyarakat desa masih sangat kuat, mereka belum siap menerima hal baru dan berkembang dilingkungannya. Kesadaran multikulturalisme yang minim membuat mereka menutup rapat pintu toleransi terhadap sesuatu yang baru dan dianggap berbeda.

“Sebagian besar warga desa tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah yang berkembang di desanya. Adanya rasa ketidak senangan warga terhadap Jemaat Ahmadiyah.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Faktor kebencian dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting yang mendasari perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Dari faktor kebencian tersebut, muncul pikiran dalam benak masyarakat untuk menyingkirkan Jemaat Ahmadiyah dari desa Purworejo. Bagi kelompok intoleran, Jemaat Ahmadiyah dianggap berbeda dan tidak sama dengan kepercayaan agama Islam pada umumnya.

“Adanya sikap penolakan dari warga terhadap Jemaat Ahmadiyah, rasa kebencian karena dianggap berbeda.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Masyarakat Desa Purworejo, sebagian besar tidak senang dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Desa mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Jemaat Ahmadiyah ingin membangun Masjid sendiri, masyarakat mulai takut dan tidak terima dengan pembangunan Masjid milik Jemaat Ahmadiyah tersebut. Masyarakat yang tidak suka dengan kehendak para Jemaat membuat kesepakatan untuk menolak pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Namun sayangnya, Masjid tersebut telah memiliki IMB yang sah dan sudah ditanda tangani oleh ketua Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal sejak tahun 2004.

“Ada IMBnya dibawa Bapak. Sebelumnya kan kita bangun masjid di tahun 2003, nah itu udah ada rencana bangun masjid kita juga bilang dulu ke kepala desanya yang nyaranin buat bikin IMB. Terus kita buat IMB dan dapat tanda tangan dari Kepala Desa yang dulu.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Seperti yang telah diketahui bahwa hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar nampak baik-baik saja seperti tidak ada masalah maupun konflik diantara mereka. Namun kembali lagi, isi hati dari masing-masing pribadi tidak ada yang tahu. Jemaat Ahmadiyah juga mengakui bahwa hal tersebut memang benar adanya. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang ada didalam masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk ikut tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah.

“Setelah perusakan sama seperti ga ada apa-apa kalau sama masyarakat, hubungan sama masyarakat ga masalah. Jadi seolah tidak ada apa-apa gitu cuma kalau kita jalan setelah ada kejadian itu mereka yang tadinya agak nganu mungkin kasian atau gimana ya. Kalau dijalan ada kita diem aja, ya intinya ya itu ga ada masalah.” (Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Adanya beberapa kelompok masyarakat radikal yang ada di desa purworejo mempengaruhi pandangan masyarakat biasa terhadap Jemaat Ahmadiyah yang dianggap sesat dan menyesatkan. Awal mula kebencian mereka didasari oleh sikap radikal yang diterimanya semasa masih mengenyam pendidikan pesantren di Ponpes Al-Mukmin Sukoharjo milik Abu Bakar Ba'asyir. Orang-orang yang pernah tergabung dalam organisasi Majelis Mujahidin Indonesia yang kini sudah dibubarkan adalah mereka yang menjadi pelopor gerakan radikal dan menganggap bahwa Jemaat Ahmadiyah ini sesat dan menyesatkan.

Dalam tahapan kerusuhan massal, berkembannya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian berkaitan dengan faktor pencetus yaitu peristiwa yang memicu kekerasan. Dalam

kasus perusakan Masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, berkembangnya perasaan kebencian dalam diri masyarakat ditujukan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang ada di desa mereka. Berkembangnya perasaan kebencian didasari oleh sekelompok orang yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah dan tidak menerima kepercayaan Ahmadiyah berkembang di daerah mereka. Perasaan kebencian diawali dari kelompok radikal penganut islam garis keras yang ada di Desa Purworejo yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah.

Dalam tahapan kerusuhan massal, mobilisasi untuk beraksi diartikan sebagai tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, mobilisasi massa untuk beraksi sudah terencana dan terstruktur rapi sebelum melancarkan aksi perusakan Masjid Al-Kautsar. Mobilisasi digiring dari opini publik masyarakat Desa Purworejo untuk menyetujui dan mengambil sikap terhadap pembangunan Masjid Al-Kautsar yang dibangun Jemaat Ahmadiyah. Masyarakat yang tidak senang dengan pembangunan Masjid Al-Kautsar membuat sebuah koalisi untuk memberhentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar hingga perusakan Masjid Al-Kuatsar. Mobilisasi dibentuk berdasarkan rapat-rapat yang digelar di balai desa dan diskusi *online* yang diadakan didalam grup *Facebook* desa milik masyarakat Desa Purworejo.

Perencanaan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2016 dan tindakan eksekusi penghancuran masjid dilakukan pada tanggal 23 Mei 2016 tengah malam pukul 23.00 WIB dan berlangsung selama dua sampai tiga jam dan pada pukul 02.00 WIB dini hari suara benturan dan pukulan terhadap bangunan sudah mulai reda dan hening. Kejadian tersebut berlangsung pada saat hujan lebat dan disertai petir. Massa yang ikut melakukan aksi tersebut terhitung banyak dari suara motor yang melintas berbondong-bondong menuju ke arah Masjid Al-Kautsar. Mobilisasi saat sebelum eksekusi, *briefing* diadakan di kantor Balai Desa Purworejo tanpa mengundang Jemaat Ahmadiyah dalam forum tersebut. Setelah *briefing* dan persiapan peralatan yang lengkap, massa mulai beramai-ramai menyisir jalanan Purworejo untuk menuju Masjid Al-Kautsar dan melakukan eksekusi perusakan dan penghancuran masjid milik Jemaat Ahmadiyah tersebut.

Mobilisasi massa yang melakukan kerusuhan massal tersebut tidak hanya merusak dan menghancurkan masjid saja, namun mereka juga melakukan penjarahan dan pengerukan barang-barang milik Jemaat Ahmadiyah yang ada di dalam masjid tersebut. Material pembangunan masjid tidak lupa mereka ambil seperti semen, pasir hingga pintu masjid. Paku-paku yang ada di masjid juga mereka buang ke dalam sumur yang ada di masjid tersebut. Dinding-dinding masjid mereka lubangi, atap-atap dari baja ringan berhasil mereka porak porandakan, dan barang-barang yang ada di dalam masjid berhasil mereka kuras sampai bangunan masjid

hanya menyisakan puing-puing bangunan yang tidak dapat lagi dipakai untuk beribadah.

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, adanya perbedaan antar kelompok sosial disebabkan karena adanya cara pandang yang berbeda dalam menilai Jemaat Ahmadiyah dari kelompok masyarakat mayoritas. Pemahaman kelompok masyarakat mayoritas terhadap Jemaat Ahmadiyah dinilai berbeda dan menyebabkan pertikaian.

Pertikaian yang terjadi sebelumnya hanya berupa pelarangan-pelarangan yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk berhenti membangun Masjid. Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa pihaknya tidak salah dan prosedur pembangunan masjid sudah mereka lengkapi. Warga masyarakat yang geram atas tindakan Jemaat Ahmadiyah yang terus melakukan kegiatan pembangun masjid Al-Kautsar membuat rencana agar Masjid berhenti dibangun. Puncaknya adalah pada tahun 2016 yaitu perusakan dan penghancuran Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah yang mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan masjid, dan menyebabkan masjid tidak dapat digunakan lagi.

“Dulunya Pak Ta’ziz dan Pak Aziz mondok di Ngruki di Pesantren milik Abu Bakar Ba’asyir yang dipenjara itu, di daerah Solo. Dia kan pernah mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia kemudian dibubarkan. Yang memberikan kebencian ya orang-orang itu temennya Pak Ta’ziz dan Pak Aziz yang mondok di Ngruki itu dari golongan Muhammadiyah, kalau dari golongan NU biasa-biasa saja.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Faktor sosial menjadi salah satu faktor yang krusial yang mendasari adanya tindakan perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Disamping karena adanya penerimaan masyarakat yang belum siap dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah, perusakan juga didasari oleh perasaan kebencian yang ada pada diri masyarakat di Desa Purworejo.

c. Faktor Agama

Faktor agama juga merupakan faktor yang penting karena mempengaruhi perilaku masyarakat dari Desa Purworejo. Kabar simpang siur yang mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat dan keluar dari agama Islam sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia, hingga akhirnya sampai di Desa Purworejo.

“Sudah terprovokasi dan gamau tau lagi bagaimana dan apa itu Ahmadiyah versi dari sumbernya. Tetapi karena wujud dari adanya sikap intoleran yang masih ada menjadi komplek sekali masalahnya tidak hanya dari masyarakat tetapi juga sampai ke pemerintahnya juga yang dirasa kurang tegas.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah dianggap berbeda dan dianggap sesat oleh masyarakat. Ditambah dari kekuatan kelompok Islam garis keras yang tidak menerima kehadiran Ahmadiyah sejak awal. Tudingan masyarakat tersebut karena terbitnya Fatwa MUI pada tahun 2005 dan ditetapkannya SKB Tiga Menteri yang justru mendorong masyarakat untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dan adanya ketakutan dari pihak NU maupun Muhammadiyah jika Ahmadiyah terus dibiarkan dan berkembnag dilingkungannya maka akan mengakibatkan dan mempengaruhi

masyarakat mayoritas ikut berpindah kedalam Jemaat Ahmadiyah baik dari anggota NU maupun Muhammadiyah.

“Selain itu, juga ada ketakutan dari warga khususnya Tokoh Agama seperti saya jika pada akhirnya murid-murid saya atau golongan dari saya jadi masuk ke aliran Ahmadiyah bukan NU lagi, dan ketakutan yang sama yang dirasakan dari kelompok Muhammadiyah.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Sebagai seorang tokoh agama di desanya, Kyai Mas’ud mencoba untuk bersifat netral dan memberikan toleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Beliau menyayangkan adanya kasus perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah tersebut, menurut beliau seharusnya sesama umat beragama seharusnya bisa menghormati satu sama lain untuk memilih kepercayaannya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa beliau juga mengatakan bahwa ada beberapa kelompok orang yang memang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah.

“Kita sebenarnya kasian, kita ga apa-apa sih mbak, ya mereka mau buat masjid sendiri ya kita iyain aja kan sama-sama mau ibadah. Tetapi ya itu ada yang tidak suka dengan mereka yang bilang kalau ajarannya sesat atau apalah gitu, tapi kalai dari kami ya udah membiarkan saja kami menghormati setiap perbedaan yang ada wong itu pilihan mereka ya sudah.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Adanya beberapa warga masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa ajaran yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah adalah kepercayaan yang sesat, mempercayai ada nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad SAW, cara beribadah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, dan kitab suci bukan Al-Qur’an. Dari berita yang beredar

tersebut, masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah membuat kesepakatan untuk merusak Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah sebagai peringatan bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak diperbolehkan membuat rumah ibadah di Desa Purworejo.

“Ada beberapa warga desa yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah ini, baik dari kelompok NU sendiri maupun dari kelompok Muhammadiyah. Ada yang bilang kalau misalnya ajaran Ahmadiyah ini sesat, nabinya berbeda, sholatnya berbeda dan kitabnya bukan Al-Qur’an.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perbedaan agama menjadi faktor utama dalam kerusuhan yang terjadi di Desa Purworejo. Perbedaan pengertian agama dari Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat mayoritas masih dalam belenggu kesalahan pahaman.

Masyarakat mayoritas menilai bahwa perbedaan kebudayaan pada agama yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh umat islam pada umumnya. Simpang siur kabar menyebutkan bahwa Ahmadiyah dianggap agama yang sesat dan keluar dari agama islam. Dari kesalahan pahaman tersebut, menyebabkan perbedaan pengertian pola kebudayaan antara masyarakat mayoritas dan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Perbedaan tersebut merambat menjadikan konflik sosial yang terjadi di Desa Purworejo.

Ketakutan berlebih yang dirasakan oleh tokoh agama setempat membuat mereka ketakutan jika golongan mereka berpaling dan masuk dengan Jemaat Ahmadiyah. Tokoh agama yang menerima dan menghormati Jemaat Ahmadiyah, sikap mereka hanya membiarkan Jemaat Ahmadiyah dan tidak ikut melarang. Namun jika dari tokoh agama yang menolak, mereka benar-benar ingin menghilangkan Jemaat Ahmadiyah dari desa mereka.

“Ketakutan dari warga khususnya tokoh agama seperti saya ajika pada akhirnya kelompok saya jadi masuk ke Ahmadiyah bukan NU lagi dan ketakutan dari Muhammadiyah juga sama kalau misalnya kelompok mereka pindah ke Ahmadiyan semua bagaimana” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Kesalah pahaman dari masyarakat desa purworejo menjadikan Jemaat Ahmadiyah dirundung kebencian dari masyarakat desa. Tidak adanya ruang untuk berbicara kepada publik menjadikah Jemaat Ahmadiyah selalu dipandang salah dimata masyarakat. Kabar ysng menyebar dimasyarakat mengabarkan bahwa adanya keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad diyakini Jemaat Ahmadiyah sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW.

“Ada yang bilang dari golongan yang tidak suka itu mengatakan kalau nabi yang dipercayai Ahmadiyah itu berbeda, yang dipercayai Jemaat Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nabinya beda tapi kok nyatanya sholatnya juga masih sama juga dengan masyarakat islam lainnya.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Anggapan sesat yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah seakan tidak ada habisnya. Kasus di Desa Purworejo bukan kali pertama kasus kekerasan yang terjadi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pentingnya pemahaman bagi masyarakat untuk mengerti bagaimana keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya perlu disampaikan di dalam forum atau dengan pendekatan tertentu. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kasus yang serupa dikemudian hari dan untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa pemikiran mereka terhadap Ahmadiyah adalah salah dan Jemaat Ahmadiyah tidak seburuk seperti apa yang diberitakan.

“Ada mbak, masyarakat mayoritas ini menganggap kalau Jemaat Ahmadiyah ini sesat.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Sudah menjadi rahasia umum diberbagai daerah di Indonesia, sejak adanya fatwa MUI yang menetapkan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan serta keluar dari islam, sikap diskriminasi yang diterima Jemaat Ahmadiyah semakin besar dan parah. Jemaat Ahmadiyah selalu ditunjuk sebagai kepercayaan yang sesat dan keluar dari Islam. Padahal dalam tata cara ibadah Jemaat Ahmadiyah dengan islam yang lain tidak ada yang berbeda.

“Kami dianggap sesat, keluar dari islam atau apakah Al-Qur’annya beda, Nabinya beda. Padahal mah sama saja kayak islam yang lainnya.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah juga mengakui bahwa adanya beberapa orang yang ada di desa mereka ada yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Seperti yang sudah diketahui bahwa di desa purworejo ada masyarakat

yang menganut islam garis keras. Seperti Ta'ziz yang sekarang merupakan ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, dahulunya merupakan barisan penganut islam garis keras yang ada di desanya. Dan seperti yang diketahui, bahwa barisan islam garis keras tersebut adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai gerakan radikal dan paling tidak senang jika ada yang berbeda dari kelompok mereka.

“Tetapi memang ada beberapa orang di desa sini yang sangat tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah ini, yaitu dari masyarakat dukuh Bayong yang mayoritas menganut Muhammadiyah garis keras. Mereka seperti radikal sekali, dan paling tidak senang jika ada yang berbeda dari mereka. Mungkin karena itu lalu perusakan masjid bisa terjadi.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Jemaat Ahmadiyah juga mengakui, hubungan sosial mereka dengan masyarakat sekitar terjalin baik-baik saja dan tidak ada masalah. Namun, Jemaat Ahmadiyah membenarkan jika sebagian masyarakat ada yang tidak siap menerima kehadiran mereka di desanya. Kelompok tersebut adalah masyarakat yang memiliki pola pikir radikal yang susah untuk menerima perbedaan dan kebudayaan baru. Dari kelompok ini, masyarakat radikal mulai menyebarkan isu-isu yang belum tentu kebenarannya untuk memojokkan Jemaat Ahmadiyah. Isu simpang siur mengenai adanya nabi baru, aliran menyesatkan, sampai sholat yang berbeda serta bayaran untuk tiap Jemaat Ahmadiyah yang baru bergabung.

“Dari kelompok tertentu kan memang ada kebencian terhadap Ahmadiyah terutama yang punya pandangan radikal. Mereka menanamkan pemikiran bahwa Ahmadiyah itu punya nabi baru, aliran menyesatkan, sholatnya ga karuan, mau sholat dimasjid orang tuh lantainya dibersihin.” (Wawancara dengan Sekretaris Jemaat

Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Kekerasan tidak dapat dihindari ketika masyarakat mulai terpengaruh dengan tekanan sosial dari beberapa pihak yang menganggap Jemaat Ahmadiyah berbeda dari kepercayaan umat islam pada umumnya. Masyarakat merasa bahwa nilai-nilai antara kepercayaan Jemaat Ahmadiyah dengan umat Islam pada umumnya berbeda, terutama dalam masalah kenabian dan kitab suci. Tekanan sosial dari beberapa pihak yang tidak menerima kehadiran Jemaat Ahmadiyah mulai mempengaruhi masyarakat untuk menyetujui penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Kerusuhan massal yang terjadi karena tekanan sosial mengakibatkan konflik sosial dan perusakan terhadap Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah tidak dapat terelakkan.

Masyarakat radikal kebanyakan merupakan lulusan Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Solo Raya milik Abu Bakar Ba'asyir yang terkenal dengan sikap radikalnya. Sikap radikal menciptakan sikap intoleran dari masyarakat penganut islam garis keras yang tidak bisa menerima perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Jemaat Ahmadiyah merupakan organisasi baru di desanya, tidak adanya sikap penerimaan masyarakat intoleran terhadap kelompok baru membuat masyarakat intoleran marah dan menjadi benci dengan Jemaat Ahmadiyah. Berkembangnya perasaan kebencian tersebut membentuk faktor pencetus terjadinya konflik sosial yang menimbulkan kekerasan dan perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah yang ada di Desa Purworejo.

Faktor kepentingan agama dari masyarakat intoleran yang menolak adanya aliran agama islam baru di desa mereka selain aliran agama yang lebih dahulu mereka anut di desa purworejo. Perbedaan aliran agama menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat desa purworejo, kesadaran toleransi bagi masyarakat desa masih sangat rendah dan masih adanya pemikiran masyarakat yang saklek terhadap agama tertentu yang mereka percayai. Sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru masih sangat rendah bagi warga desa purworejo. Adanya islam garis keras yang berpemikiran kolot dan intoleran mempersulit perkembangan budaya baru yang akan masuk di desa mereka.

Dalam perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, perbedaan individu yang didasari atas kepentingan pribadi menimbulkan perasaan kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah yang dianggap tidak sesuai dengan kepercayaan umat islam pada umumnya. Jemaat Ahmadiyah dianggap pribadi yang berbeda dengan mereka sebagai masyarakat mayoritas pada umumnya. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi diantara masyarakat mayoritas dengan Jemaat Ahmadiyah seringkali didasari atas perbedaan pendirian dari kelompok masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Selain karena perbedaan pendirian, konflik terhadap perbedaan individu juga didasari oleh perbedaan perasaan. Masyarakat mayoritas merasa bahwa kepercayaan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah adalah salah. Perasaan tersebut terus dibawanya yang akhirnya menyebabkan

konflik sosial diantara keduanya. Perasaan salah sangka tersebut tidak menemukan titik terang untuk dapat menerima perbedaan, keterbatasan kesempatan Jemaat Ahmadiyah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka yakini menjadi masalah utama atas kesalah pahaman yang telah melekat pada pribadi masing-masing warga masyarakat desa purworejo.

Faktor Agama menjadi faktor yang dominan yang mendasari perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Masyarakat menganggap bahwa kepercayaan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan kaidah Islam yang semestinya. Hal itu menjadikan konflik bagi Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat desa purworejo. Tidak adanya ruang untuk menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya juga menjadi masalah yang mendasari kesalah fahaman yang tersebar di masyarakat Desa Purworejo.

d. Faktor Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyebabkan terpasungnya kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah. Terbitnya segala peraturan mengenai Jemaat Ahmadiyah selalu mngenai dengan peraturan kontra dari Pemerintah. Seperti terbitnya Fatwa MUI Tahun 2005 dengan nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. Secara tidak langsung MUI mematikan organisasi Ahmadiyah secara perlahan. Perlakuan diskriminasi mulai berdatangan sejak diterbitkannya fatwa. Pelarangan dan kecaman dari masyarakat Purworejo terhadap Jemaat

Ahmadiyah di Desanya selalu dilontarkan dengan untaian kata-kata pemberhentian Masjid yang tengah dibangun Jemaat Ahmadiyah.

“Kalau penyerangan tidak ada, cuman gini suatu kita mau bangun masjid ada sekelompok terutama dari pihak aparat pemerintah desa yang pada saat itu memberitahukan kepada kita untuk tidak membangun karena membawa nama masyarakat. Cuma datang rame-rame dari aparat desa dan masyarakat saat pembangunan masjid. Kalau anarkis tidak pernah, Cuma ini perusakan pada tahun 2016 saja.” (Wawancara dengan Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Kamzah, pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.)

Hukum yang ditetapkan membuat terbatasnya Jemaat Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya maupun sulitnya untuk mendirikan rumah ibadah sendiri. Bukti nyata pelarangan pendirian Masjid Al-Kautsar dikecam oleh beberapa orang yang ada di Desa Purworejo. Perusakan dilakukan secara berkelompok dan tidak adanya pihak yang membela Jemaat Ahmadiyah sebagai korban atas perusakan masjid tersebut. Faktor kebijakan menjadi alasan penting sebagai upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat minoritas yang seharusnya dilindungi.

Bukan justru memicu adanya kekerasan dan diskriminasi akibat sebuah kebijakan yang tidak membela kaum minoritas. Semenjak ditetapkannya Fatwa MUI Tentang Aliran Ahmadiyah dan SKB Tiga Menteri Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat, secara tidak langsung pemerintah ikut membatasi kebebasan beragama dari masyarakat minoritas terutama Jemaat Ahmadiyah.

Dari faktor kebijakan ini juga yang membuat adanya kasus perusakan terhadap Masjid Al-Kautsar karena aliran Ahmadiyah telah dianggap sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. Faktor kebijakan yang meliputi pengakuan dari pemerintah menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Lemahnya pengakuan dari pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat Jemaat Ahmadiyah kesulitan untuk menikmati ruang bebas dalam kehidupan bernegara. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah akan menjadikan kelompok intoleran akan lebih mudah untuk melakukan tindakan intoleran yang merugikan Jemaat Ahmadiyah.

Payung hukum semestinya diterapkan kepada masyarakat minoritas khususnya Jemaat Ahmadiyah, melihat dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, payung hukum seringkali justru mendiskriminasi Jemaat Ahmadiyah untuk tidak dapat melakukan kebebasan beragama sesuai kepercayaan yang mereka yakini. Hal ini berdampak kepada kelompok intoleran yang dapat memanfaatkan hukum tersebut untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Faktor kebijakan menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat minoritas dari ancaman pihak luar yang tidak sepaham dengannya. Lemahnya jumlah kuantitatif akan kuat jika diimbangi dari kebijakan pemerintahan yang melindungi kebebasan beragama terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Surat Keputusan Bersama atau biasa terkenal dengan sebutan SKB Tiga Menteri yang diterbitkan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 dan

Nomor 199 Tahun 2008 KEP-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, membuat Jemaat Ahmadiyah semakin tertekan dan tidak dapat bergerak bebas untuk menyebarkan ajarannya. Pemerintah seakan membatasi kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah. Sejak ditetapkannya SKB Tiga Menteri, Jemaat Ahmadiyah merasa terusik dan tidak dapat bergerak bebas untuk berdakwah hingga mendirikan rumah ibadah sendiri.

“Mengusik, kami jadi tidak bebas untuk berdakwah maupun mendirikan rumah ibadah sendiri.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

SKB Tiga Menteri juga dimanfaatkan oleh kelompok intoleran untuk merencanakan perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Ketegasan perlindungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga tidak dirasakan bagi Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah Desa juga ikut mendukung perusakan Masjid Al-Kautsar tersebut.

“Pelaku itu sebenarnya dua orang Pak Lurah sama ajudannya. Terus di Desa saya ini ada islam garis keras rata-rata lulusan dari Ponpes Al-Mukmin Ngruki Solo punya Abu Bakar Ba’asyir. Ya itu orang-orang yang tidak suka dengan Jemaat kan membuat seperti kelompok gitu dan sepakat buat menghancurkan masjid.” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Upaya perlindungan masyarakat minoritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sendiri juga masih belum terimplementasi dengan baik. Tidak ada payung hukum yang melindungi masyarakat minoritas membuat

masyarakat minoritas, khususnya Jemaat Ahmadiyah semakin tertekan dan sulit untuk membela diri. Setelah terjadi kasus perusakan masjid Al-Kautsar, pemerintah daerah kabupaten kendal hanya membiarkan saja dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah ikut bersimpati dengan mendatangi tempat kejadian namun hanya pada hari itu saja dan selanjutnya tidak ada tindak lanjut apapun.

“Tidak ada tindak lanjut pemerintah daerah sendiri” (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Selain tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah kabupaten kendal, dari pemerintah desa juga sangat membatasi Jemaat Ahmadiyah untuk mengajukan aspirasi. Permintaan Jemaat Ahmadiyah untuk menjelaskan kepada masyarakat desa bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya sangat sulit dan tidak diberi ruang. Hal ini menyebabkan kesalah pahaman masyarakat kepada Jemaat Ahmadiyah mengikuti isu yang beredar bahwa Ahmadiyah berbeda dan keluar dari Islam.

Ketegasan pemerintah juga diperlukan dalam kancah hukum untuk menetapkan tersangka tindak diskriminasi terhadap masyarakat minoritas. Kebijakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat minoritas khususnya Jemaat Ahmadiyah, juga sebagai hukuman bagi pelaku tindak intoleran yang merugikan masyarakat minoritas. Selain itu, kebijakan hukum yang tegas juga dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan tidak menyenangkan dari masyarakat intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah.

“Keadilan tidak diterapkan, seperti pelaku perusakan masjid tidak dihukum dengan hukum yang benar”. (Wawancara Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Ta’ziz di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.)

Tidak adanya respon dari Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal menanggapi kasus perusakan masjid Al-Kautsar ini menandakan bahwa faktor kebijakan dari pemerintah daerah masih sangat rendah untuk menangani kasus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas. Kebebasan beragama di Kabupaten Kendal menjadi PR bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi warganya menjalankan kepercayaan yang telah dipilih. Kasus perusakan Masjid Al-Kautsar seakan menjadi teguran bagi pemerintah daerah untuk bersikap lebih tegas demi melindungi kebebasan beragama dan menjalankan keyakinannya di Kabupaten Kendal.

“Ga ada respon apa-apa sih mbak yang saya tahu, ya pas kejadian perusakan itu saja Bupati dateng sama rombongannya lihat Masjid Al-Kautsar yang dirusak itu kemudian pulang.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Purworejo, Kyai Mas’ud, di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, tanggal 30 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.)

Pemerintah Desa Purworejo seakan menutup mata atas kejadian yang telah menimpa Jemaat Ahmadiyah. Tidak adanya himbauan untuk sekedar berempati atau menanamkan sikap toleransi kepada masyarakat desa paska kejadian perusakan masjid tersebut. Pemerintah Desa seakan tidak mengambil sikap netral sekedar untuk menenangkan atau melindungi Jemaat Ahmadiyah dari sikap intoleransi masyarakat.

“Ga ada mbak, dari Kepala Desa maupun pemerintah desa juga membiarkan saja.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Ditetapkannya Fatwa MUI pada tahun 2005 justru dimanfaatkan oleh kelompok intoleran sebagai senjata untuk mendiskriminasi Jemaat Ahmadiyah. Penetapan SKB Tiga Menteri tentang Jemaat Ahmadiyah pada tahun 2008 didasari oleh UU Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Beragama tahun 1969. Undang-undang ini dianggap masih multitafsir dan sering digunakan kelompok intoleran untuk melakukan tindak diskriminasi hingga kriminalisasi.

“Ada undang-undang yang PNPS nomor berapa aku lupa pokoknya tahun 1969 atau 65 gitu aku lupa, pokoknya yang pencegahan penyalahgunaan Penodaan Beragama pasal undang-undang itu tuh yang menjadi dasar mereka bikin SKB Tiga Menteri. Dan undang-undang ini multitafsir dan sering dipakai untuk ngejerat atau kriminalisasi, kayak Ahok.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Dengan ditetapkannya SKB Tiga Menteri tersebut, sangat mengusik kebebasan beragama, terutama bagi Jemaat Ahmadiyah. Mereka merasa seperti selalu diawasi dan untuk membangun rumah ibadah sendiri juga sangat sulit. Banyak masyarakat yang memperingatkan mereka untuk berhenti meneruskan pembangunan Masjid Al-Kautsar. Ucapan kata-kata pelarangan yang diteriakan masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah tentu saja membuat Jemaat Ahmadiyah semakin merasa di asingkan dan dilarang keberadaannya, bahkan dalam hal membangun masjid yang notabennya masjid adalah rumah ibadah umat islam.

“Dari kita menjadi seperti diawasi dan ketika mau bangun masjid selalu diteriakin untuk berhenti.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dinilai tidak memberikan kebebasan beragama bagi warganya, terutama masyarakat minoritas. Setelah kasus penghancuran masjid tersebut terjadi, tidak ada tindak lanjut yang diambil pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan atau upaya untuk sekedar menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah Daerah hanya datang saat kejadian dan langsung meninggalkan lokasi.

“Pemda tidak memberikan kebebasan beragama. Pemda baru datang setelah terjadi perusakan masjid. Cuma bilang aja buat menghimbau buat tetap jaga biar masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, toleransi. Baru dihancurin baru bilang kayak gitu, seperti hanya untuk formalitas saja.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Dalam tahapan kerusuhan massal, kontrol sosial diartikan sebagai tindakan dari pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan. Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, kontrol sosial dari pihak ketiga tidak mereka dapatkan untuk meleraikan masalah yang tengah mereka hadapi. Pihak ketiga hanya datang dari Polsek Gemuh untuk mengidentifikasi masalah setelah kejadian tersebut berlangsung. Polisi baru dapat datang ke tempat kejadian perkara saat pagi hari setelah masjid sudah dirusak oleh masyarakat.

Pemerintah daerah yang datang pada saat itu juga hanya untuk menenangkan Jemaat Ahmadiyah atas perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Tidak ada tindak lanjut yang diambil oleh Pemerintah daerah setelah kejadian perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Dari pemerintah desa purworejo juga tidak ada tindakan

untuk merespon kejadian yang tengah dialami oleh Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah seolah menutup mata dan tidak menindak lanjuti pelaku yang melakukan perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah.

Sikap diskriminasi dan tindakan intoleran dari masyarakat maupun pemerintah sudah sering diterima oleh Jemaat Ahmadiyah. Namun keadaan mereka tidak menyurutkan niat mereka untuk berhenti memperjuangkan haknya sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang dapat menyuarakan aspirasinya dan menjalankan kebebasan beragama di negara multikultural ini. Camat Ringinarum pernah mengadakan sebuah Forum Kerukunan Umat Beragama untuk membahas mengenai Masjid Al-Kautsar yang dibangun Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Namun, Jemaat Ahmadiyah selalu tidak diberi kesempatan untuk sekedar bertanya atau menjawab.

“Dulu juga sempat ada FKUB tapi acara tersebut cenderung untuk formalitas dan tidak benar-benar untuk memfasilitasi Jemaat Ahmadiyah. Ketika Bapak saya angkat tangan buat bicara ga dikasih sama pihak sana.” (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.)

Tidak adanya mediasi dari pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus yang sedang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah membuat Jemaat Ahmadiyah sulit untuk mencari pembelaan. Kasus perusakan Masjid Al-Kautsar akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Kendal untuk meguak latar belakang terjadinya kasus tersebut. Sayangnya, belum sampai ditemukan siapa pelaku sebenarnya, kasus sudah ditutup begitu saja dan putusan pengadilan menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka. Dari Jemaat

Ahmadiyah memaafkan pelaku dan selanjutnya berakhir dengan damai dan tersangka tidak jadi di penjara.

Pemerintah desa yang ikut membatasi kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah. Tindakan tidak netral dari aparat desa juga dinilai ikut mendiskriminasi Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Kepala Desa merupakan seseorang yang paling semangat untuk menindak lanjuti pembangunan Masjid Al-Kautsar tersebut. Sikap diskriminasi tersebut sudah terlihat sejak beliau belum menjabat menjadi kepala desa, beliau menjadi seorang aktivis yang menyebarkan tanda tangan kepada masyarakat untuk menyetujui pemberhentian pembangunan Masjid Al-Kautsar.

Meskipun demikian, pemerintah desa maupun pemerintah daerah tidak membuka pintu mediasi bagi Jemaat Ahmadiyah untuk menegakkan keadilan. Meskipun tersangka sudah dimaafkan oleh pihak Jemaat Ahmadiyah namun tidak ada keberlanjutan untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di Kabupaten Kendal. Tidak adanya mediasi dari pemerintah desa maupun pengambilan kebijakan dari pemerintah daerah membuat kasus ini semakin tenggelam dan hilang begitu saja. Jemaat Ahmadiyah tidak mendapat ganti rugi atas peristiwa yang menimpa mereka. Pemerintah desa juga tidak menetapkan tindak lanjut teags terhadap pelaku maupun masyarakat yang lain. Jemaat Ahmadiyah malah masih mendapat tekanan dari Kepala Desa untuk tidak merenovasi masjid

paska kejadian perusakan Masjid Al-Kautsar oleh warga masyarakat desa purworejo.

“Kita Cuma bawa ke pengadilan, setelah itu diproses di pengadilan. Pelaku ditetapkan tersangka sebanyak dua orang, tetapi kita maafkan dan tidak jadi di penjara lalu kasus kayak tenggelam gitu aja mbak. Dari Pemerintah Desa juga tidak ada yang memberikan ruang mediasi. Dari Pemerintah Daerah Kendal juga Cuma dateng pas perusakan saja. (Wawancara dengan Anggota Jemaat Ahmadiyah, Hajar, di Desa Purworejo, tanggal 2 Maret 2019 pukul 11.00 WIB)

Sikap diskriminasi yang dilakukan masyarakat, pemerintah desa hingga Muspika memperlihatkan bahwa adanya pelanggaran HAM yang membatasi kebebasan Jemaat Ahmadiyah untuk berbicara maupun menyatakan pendapat. Hal ini senada dengan teori Rosevelt yang menyatakan bahwa untuk hidup bermasyarakat dan bernegara seharusnya setiap manusia memiliki kebebasan, dan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat merupakan salah satunya. Diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah kerap terjadi, diskriminasi tersebut menyebabkan pelanggaran HAM yang dimiliki oleh kelompok minoritas yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia.

Faktor kebijakan dianggap sebagai faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Faktor kebijakan seharusnya menjadi perlindungan bagi Jemaat Ahmadiyah sebagai masyarakat minoritas yang mengalami diskriminasi, namun yang didapatkan adalah sebaliknya yang justru faktor kebijakan yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah.